

ANALISIS PENGARUH INVESTASI DALAM NEGERI DAN ARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA

Riky Aulia Rachman Marpaung¹, Uci Aulia Sinaga², Wizya Vita Ananda³, Nasrullah Hidayat⁴

Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara

E-mail: rikymc02@gmail.com, uciauliasinaga@gmail.com, wizyavitaananda@gmail.com,
nasrullahhidayat816@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMDN dan TPAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yakni time series dari tahun 2010-2022. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Hasil temuan menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan berpengaruh positif tidak signifikan pada jangka pendek terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan berpengaruh positif tidak signifikan pada jangka pendek terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Penanaman Modal Dalam Negeri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

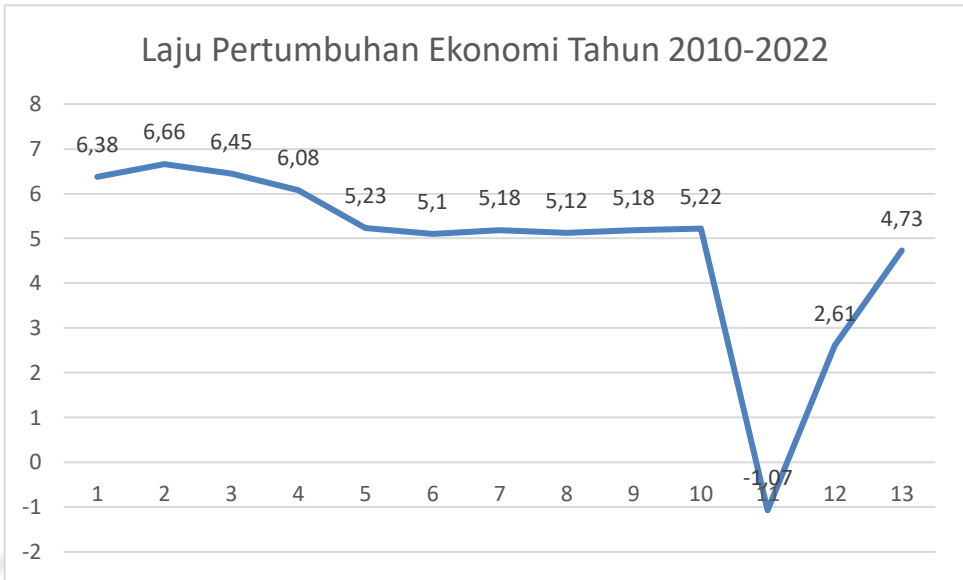
This study aims to determine the effect of PMDN and TPAK on Economic Growth in North Sumatra. The data used is secondary data, namely time series from 2010-2022. This study was analyzed using the Error Correction Model (ECM) method. The findings show that Domestic Investment (PMDN) has a significant negative effect on Economic Growth, and has an insignificant positive effect in the short term on Economic Growth in North Sumatra. While the Labor Force Participation Rate (TPAK) has a positive and insignificant effect on Economic Growth and a positive and insignificant effect in the short term on Economic Growth in North Sumatra.

Keywords: Domestic Investment, Labor Force Participation Rate, Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Ekspansi ekonomi berfungsi sebagai indikator kemajuan suatu negara, juga sebagai peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya, dan merupakan visi penting Indonesia. Paradigma pembangunan selalu memasukkan sumber daya manusia sebagai komponen penting, karena inisiatif pembangunan pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kehidupan manusia (Bastianingrum, 2023). Melalui penerapan berbagai kebijakan, pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri. Perkembangan dan perluasan perekonomian merupakan akibat dari kegiatan perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Peningkatan berkelanjutan pada proses manufaktur barang dan jasa di berbagai industri merupakan kontributor yang signifikan terhadap perluasan perekonomian. Akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah mengalami peningkatan (Hakim, 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting yang harus diutamakan dalam suatu daerah ataupun negara karena saat tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai yang tinggi maka kesejahteraan dalam daerah tersebut akan meningkat, permasalahan pertumbuhan ekonomi dalam daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kebijakan oleh pemerintah (Fatoni & Prasetyanto, 2022).



Data yang dilansir dari BPS menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi 6.38% sedangkan di tahun 2011 meningkat sebesar 6.66%. Di tahun 2015 menurun sebesar 5.1% dan meningkat di tahun 2019 sebesar 5.22%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi turun drastis diangka -1.07% yang disebabkan kasus virus Covid-19 yang membuat seluruh perekonomian terganggu. Namun di tahun berikutnya sampai tahun 2022 mulai meningkat perlahan sebesar 4.73%. Adapun penelitian ini dikaji untuk melihat pengaruh PMDN dan TPAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

Kajian Teori
Pertumbuhan Ekonomi

David Ricardo, yang dikenal dengan teori Ricardian yang diuraikan dalam bukunya "The Principles of Political Economy and Taxation" yang diterbitkan antara tahun 1817 dan 1823, menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketika populasi masih rendah dan sumber daya alam melimpah, para pengusaha memanfaatkan sumber daya ini sebagai faktor produksi, yang mengarah pada keuntungan yang tinggi. Profitabilitas yang meningkat memungkinkan para pengusaha untuk mengumpulkan lebih banyak modal, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tuntutan pekerja akan gaji yang lebih tinggi mengindikasikan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan tingkat produktivitas (Hasan, 2018, p. 27).

Kemajuan di bidang pertanian, manufaktur, dan perdagangan semuanya berkontribusi terhadap kemakmuran, yang merupakan hasil dari proses akumulasi yang menjadi ciri pertumbuhan. Hal ini, pada gilirannya, merupakan kekuatan pendorong di balik akumulasi modal, kemajuan teknologi, pertumbuhan populasi, perluasan pasar, pembagian kerja, dan peningkatan keuntungan yang berkelanjutan. Kemajuan ini membawa kepuasan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks progresif ini, para pekerja yang merupakan mayoritas masyarakat, kemungkinan besar akan mengalami kebahagiaan dan kenyamanan terbesar karena masyarakat mencapai hasil yang lebih baik (Hasan, 2018, p. 27).

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kondisi ekonomi yang terus menerus dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi ketika tingkat aktivitas ekonomi melebihi atau melampaui tingkat tahun sebelumnya. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output per kapita, yang menandakan peningkatan standar hidup. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sering kali diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yang mencerminkan perluasan nilai tambah di berbagai sektor (Sari et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator penting untuk menganalisis kemajuan pembangunan ekonomi di suatu negara. Intinya, indikator ini mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat selama periode tertentu. (Azwina et al., 2023).

Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dapat berasal dari sumber-sumber domestik seperti PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Peningkatan investasi berpotensi mendorong perkembangan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendorong kemajuan ekonomi di suatu wilayah atau daerah. Dinamika investasi dibentuk oleh banyak faktor, yang mencakup pengaruh global, regional, dan lokal. Indonesia, karena kekayaan sumber daya alamnya, merupakan pilihan menarik bagi investor yang ingin mengalokasikan kekayaannya. Oleh karena itu, pemerintah terdorong untuk meningkatkan lingkungan investasi melalui penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang menghasilkan keuntungan bagi investor dan pemerintah. (Yunita & Sentosa, 2019).

Penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang dilakukan dalam batas wilayah Indonesia oleh penanam modal yang memanfaatkan modal yang bersumber dari dalam negeri. Ketentuan mengenai pelaksanaan penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 yang secara khusus mengatur tentang penanaman modal. Investor di Indonesia dapat terdiri dari perorangan warga negara, maupun badan usaha yang dimiliki oleh negara dan penyelenggara negara (Jufri et al., 2017).

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh berbagai faktor, seperti investasi langsung dalam negeri dan investasi internasional. Penting untuk diketahui bahwa investasi, baik dalam maupun luar negeri, mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat output dan pendapatan. Upaya harus dilakukan untuk mendorong alokasi sumber daya dalam wilayah tertentu oleh sektor swasta dan rumah tangga sebagai respons terhadap setiap peningkatan investasi, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Dampaknya, hal ini akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Korelasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan investasi pada PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) terlihat jelas. (Aswanto Aswanto, 2021).

Riset yang dilakukan (Kurniawati & Islami, 2022) Perolehan hasil PMDN mempunyai dampak besar baik “terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi et al., 2023) Faktor investasi jangka panjang dan jangka pendek memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990 hingga 2020, bahkan pada tingkat signifikansi 10%. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Irijanto & Lestari, 2022) mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang, sedangkan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam jangka pendek”.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Orang-orang berusia 15 tahun ke atas yang telah bekerja atau menganggur sementara karena berbagai alasan selama seminggu terakhir merupakan angkatan kerja. Semua orang ini telah dipekerjakan. Orang-orang yang sedang bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan termasuk dalam kategori ini. Masyarakat yang sedang aktif mencari pekerjaan, masyarakat yang sedang bersiap-siap memulai usaha, masyarakat yang putus asa mencari pekerjaan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan masyarakat yang mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja, semuanya termasuk dalam kelompok kategori orang yang dianggap pengangguran. Pengangguran terbuka adalah istilah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan bentuk pengangguran ini (Desmawan et al., 2023).

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini ditentukan dengan membagi jumlah total individu dalam angkatan kerja dengan total populasi individu usia kerja, dan kemudian mengalikannya dengan 100. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase penduduk berusia 15 hingga 64 tahun yang secara aktif terlibat dalam angkatan kerja (Gustiara et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulansari, 2021) Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tindakan perolehan temuan TPAK masing-masing mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan tidak signifikan. Riset dilakukan oleh (Azzahro et al., 2022) Temuan-temuan yang diperoleh dari TPAK baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

mempunyai dampak yang kecil terhadap ekspansi perekonomian. Riset dilakukan oleh (Muna, 2023) Sebaiknya diperoleh hasil pengujian jangka panjang dan jangka pendek terhadap variabel TPAK yang berdampak terhadap perluasan perekonomian Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencakup tahun 2011 hingga 2022 yang menggunakan data sekunder berupa time series, khususnya data kuantitatif. Data yang disajikan di sini memberikan informasi mengenai pertumbuhan perekonomian, PMDN, dan TPAK di Provinsi Sumatera Utara. Informasi tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu pemeriksaan dan deskripsi data dalam gaya tabel. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perekonomian yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dengan penekanan khusus pada pertumbuhan ekonomi, PMDN, dan TPAK. Metode analisis yang dikenal dengan ECM digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jangka Panjang

Berikut ini adalah hasil estimasi jangka panjang menggunakan uji kointegrasi:

Variable.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-14.14255	18.89642	-0.748425	0.4714
PMDN	-0.000170	6.37E-05	-2.666697	0.0236
TPAK	0.297754	0.273045	1.090491	0.3011
R-squared.	0.446361			
Adjusted R-Squared	0.335633			
F-statistic	4.031155			
Prob(F-statistic)	0.052016			

Berdasarkan hasil uji jangka panjang, didapat persamaan:

Lpe = -14.14255 – 0.000170 + 0.297754 + εit

Jangka Pendek

Berikut ini adalah hasil estimasi jangka pendek menggunakan metode Error Correction Model (ECM):

Variable.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.469305	0.442696	-1.060108	0.3200
D(PMDN)	6.87E-05	0.000106	0.647883	0.5352
D(TPAK)	0.342722	0.192653	1.778956	0.1131
ECT(-1)	-1.237588	0.291109	-4.251287	0.0028
R-squared.	0.734539			
Adjusted R-Squared	0.634992			
F-statistic	7.378762			
Prob(F-statistic)	0.010842			

Berdasarkan hasil uji jangka pendek, didapat persamaan:

D(Lpe)it = -0.469305 + 6.87E-05it + 0.342722it – 1.237588 + μit

Tabel diatas menyajikan hasil estimasi model ECM. Estimasi model ECM menggunakan variabel ECT menunjukkan tanda negatif dan signifikan secara statistik. ECT pada penelitian ini telah lolos pada alpha 0.05 atau signifikansi 5% dapat kita lihat pada nilai probabiliti 0.0028 < 0.05.

Uji Signifikansi Parsial

a. Berdasarkan estimasi diatas, PMDN memiliki pengaruh signifikan negatif, dengan nilai koefisien sebesar -0.000170 dan signifikansi 0.0236 < 0.05. Sedangkan untuk jangka pendek,

PMDN memiliki pengaruh tidak signifikan positif, dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 6.87E-05 dengan nilai signifikansi $0.5352 > 0.05$.

b. Berdasarkan hasil estimasi diatas, variabel TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan, nilai koefisien sebesar 0.297754 dan signifikansi $0.3011 > 0.05$. Sedangkan untuk jangka pendek, TPAK berpengaruh positif tidak signifikan, nilai koefisien 0.342722 dan signifikansi $0.1131 > 0.05$.

Uji Signifikansi Simultan

Secara bersama-sama PMDN dan TPAK mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara dengan perolehan nilai Prob. (F-Statistic) sebesar $0.000 < 0.05$.

Uji R²

Dari hasil pengujian kointegrasi diketahui bahwa Nilai R² untuk jangka panjang dalam penelitian ini sebesar 0.446361. Artinya bahwa pengaruh variabel bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara dalam jangka panjang dengan periode penelitian tahun 2010-2022 sebesar 44%, maka variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat belum begitu kuat, dan sebesar 56% lagi dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Dari hasil pengujian kointegrasi diketahui bahwa Nilai R² untuk jangka panjang dalam penelitian ini sebesar Nilai R² sebesar 0.734539. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara dalam jangka pendek dengan periode penelitian tahun 2011-2022 sebesar 73%, dan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh variabel lain diluar daripada model.

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, model data untuk penelitian, baik model jangka pendek maupun model jangka panjang disajikan pada Tabel 4 berikut:

Variabel	Koefisien	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
C	-0.469305	-14.14255
PMDN	6.87E-05	-0.000170
TPAK	0.342722	0.297754
ECT(-1)	-1.237588	-
R ²	0.734539	0.446361

Pengaruh PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Estimasi PMDN jangka panjang berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan mempunyai pengaruh tidak signifikan positif pada jangka pendek terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Temuan ini tidak sejalan dengan temuan (Kurniawati & Islami, 2022) mendapat hasil PMDN memiliki pengaruh signifikan pada jangka panjang dan jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan (Pertiwi et al., 2023) juga mendapat hasil yang sama bahwa Investasi memiliki pengaruh positif pada jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Namun, temuan (Irijanto & Lestari, 2022) berdampak negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan berdampak signifikan positif dalam jangka pendek. Konsepsi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh tabungan dan investasi. PMDN, yang merupakan investasi yang didanai oleh orang Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri, berkontribusi pada kemajuan ekonomi.

Pengaruh TPAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi jangka panjang TPAK berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan jangka pendek memiliki pengaruh tidak signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan temuan (Wulansari, 2021) TPAK mempunyai pengaruh tidak signifikan positif pada jangka panjang dan jangka pendek. Namun, temuan (Azzahro et al., 2022) mendapat hasil TPAK jangka pendek dan jangka panjang

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun temuan (Muna, 2023) TPAK jangka panjang, jangka pendek berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu pengaruh utama dari TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produktivitas. Ketika lebih banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang tersedia juga meningkat. Hal ini dapat meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya lebih banyak tenaga kerja yang aktif, sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat produksi dan pendapatan nasional. Ketika lebih banyak individu mempunyai pekerjaan dan pendapatan stabil, mereka akan cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk konsumsi, investasi, dan kebutuhan lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PMDN jangka panjang berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan mempunyai pengaruh tidak signifikan positif pada jangka pendek terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. TPAK jangka panjang berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan jangka pendek mempunyai pengaruh tidak signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan kajian yang sama dengan menambah variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto Aswanto. (2021). Pengaruh Investasi dalam Negeri, Investasi Luar Negeri terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Provinsi Riau 2010-2020. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 1(1), 413–422. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.134>
- Azwina, R., Wardani, P., Sitanggang, F., & Silalahi, P. R. (2023). Strategi Industri Manufaktur Dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 44–55. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/442>
- Azzahro, I. K., Prakoso, J. A., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2022). *ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA : 2*.
- Bastianingrum, M. (2023). Pengaruh IPM, Pendidikan, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1), 57–82. <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19394>
- Desmawan, D., Kanza Salsabila, A., Amalia, L., Amantha Anargya, R., Sasi Kirana, R., & Valentina. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3(2).
- Fatoni, M. R., & Prasetyanto, P. K. (2022). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1990-2021 (Analysis of Factors Affecting Economic Growth of North Sumatra Province 1990-2021). *Jurnal Economina*, 1(3), 647–664. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.156>
- Gustiara, D. N., Budiartiningih, R., & Indrawati, T. (2021). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Antara Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Tingkat Partisipasi. *Jurnal Economica*, 10(2), 173–180.

- Hakim, A. (2023). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1283–1291. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3377>
- Hasan. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Cv. Nur Lina.
- Irijanto, T. T., & Lestari, D. M. (2022). Peran Investasi, Utang Luar Negeri, dan Inflasi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.26>
- Jufrida, F., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2017). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Fdi) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 54–68. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6652>
- Kurniawati, D. L., & Islami, F. S. (2022). Analisis Pengaruh PMA, PMDN dan Ekspor Migas-Nonmigas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.98>
- Muna, I. C. (2023). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1991-2020*. 2(1), 9–21.
- Pertiwi, A. T., Regina, I., & Sasongko, G. (2023). Pengaruh Ekspor, Investasi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2020. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 8(1), 42–66. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v8i1.3115>
- Sari, N., Harahap, I., & Tambunan, K. (2023). *Transformasi Manageria Transformasi Manageria*. 3(2), 586–608. <https://doi.org/10.47476/manageria.v3i2.3907>
- Wulansari, A. N. F. S. I. Y. (2021). *Dampak Minyak Dunia , Energi Terbarukan , dan Kebijakan Moneter*. 2019, 536–546.
- Yunita, M., & Sentosa, S. U. (2019). Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 533. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6265>

PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI SUMATERA UTARA

Billy Surbakti¹, Haifa Azalia Pinem², Hekxan A. Xanichal³, Trisna Saputri⁴, Riky Aulia Rachman Marpaung⁵,Joko Suharianto⁶

Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara
E-mail: rikymc02@gmail.com, haifaazalia01@gmail.com, trisasaputri0825@gmail.com, hekxan123@gmail.com, billysbrkt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Human Capital, Pertumbuhan Ekonomi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara pada periode 2019 - 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara selama 3 tahun dari tahun 2019 - 2022. Teknik analisis data menggunakan random effect berdasarkan uji pengganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Utara, (2) Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Utara. (3) Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Kesempatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Populasi, Pendidikan

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence Human Capital, Economic Growth on employment opportunities in North Sumatra in the period 2019 - 2022. This research uses quantitative methods with descriptive analysis. The data used in this study are secondary data sourced from the North Sumatra Central Bureau of Statistics (BPS) for 3 years from 2019 - 2022. The data analysis technique uses Random Effect based on the Multiplier Test. The results of this study indicate that (1) the GRDP has a positive and significant effect on employment opportunities in North Sumatra Province, (2) the total population has a negative and significant effect on employment opportunities in North Sumatra Province. (3) The Education has a positive and significant effect on Employment Opportunities in North Sumatra Province

Keywords: Employment Opportunities, Gross Domestic Product, Education

1. PENDAHULUAN

Mengingat pesatnya perkembangan saat ini, sumber daya manusia yang merupakan salah satu unsur unik dalam produksi memerlukan perhatian lebih dari segala aspek. Dalam dunia bisnis, peran sumber daya manusia menjadi semakin luas dan menuntut. Pengertian human capital sendiri adalah manusia mempunyai nilai dan kuantitas yang tidak terbatas dan merupakan salah satu aset utama suatu perusahaan yang dapat dikelola dalam proses yang pada akhirnya menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, konsumen, karyawan, dan masyarakat. menekankan pemahaman itu.

Menurut (Marshall, 2005), modal manusia berupa pendidikan, kesehatan, dan motivasi merupakan faktor penentu perkembangan sosial dan individu. Apalagi mengingat perekonomian global yang penuh dengan meningkatnya persaingan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pembentukan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan standar angkatan kerja, namun belajar dari masyarakat, politik dan ekonomi saja tidak cukup. Sekolah secara keseluruhan adalah sistem yang mempengaruhi pembelajaran.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, provinsi terbesar ke-9, dan jumlah penduduk terpadat ke-4 di Indonesia, dan memerlukan sumber daya manusia yang

signifikan untuk pembangunan. Sebagai salah satu provinsi berkembang di Indonesia, Sumatera Utara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari angka produk domestik bruto regional (produk domestik bruto) Sumut.



Terlihat dari grafik, tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara belum merata antar kabupaten/kota. Di Kabupaten Langkat, pemerintah berupaya memperluas lapangan kerja melalui berbagai program, sehingga lapangan kerja mencapai 524.177 orang. Misalnya, pemerintah daerah menyelenggarakan program pelatihan kejuruan dan kursus bahasa untuk mempersiapkan pencari kerja memasuki dunia kerja, dan pemerintah juga mempromosikan peluang kerja di luar negeri, seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Disusul Kabupaten Karo sebanyak 270.086 jiwa. Berdasarkan laporan kinerja BPS tahun 2022, pengembangan sektor pariwisata dan agrowisata dapat menjadi pendorong tingginya lapangan kerja. Sebaliknya, menurut BPS Kota Sibolga, pada tahun 2022 tidak terdapat lapangan karena banyaknya pekerja yang tidak bekerja karena libur, sakit, mogok kerja, dan kerusakan mesin. Namun data tersebut tidak memberikan informasi spesifik mengapa terjadi kekurangan lapangan kerja di Sibolga pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi dan investasi juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mencoba untuk memperjelas pengaruh modal manusia ditinjau dari pendidikan terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap kesempatan kerja. Pendidikan tinggi umumnya wajib bagi pekerja di Sumatera Utara. Modal manusia adalah modal yang berbeda dengan modal lainnya. Di sisi lain, sekolah, kursus, biaya pengobatan, dan studi juga merupakan modal yang meningkatkan kesehatan, pendapatan, dan harga diri sepanjang hidup. Namun modal ini tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya seperti modal fisik lainnya (Becker, 1993)

Pendidikan mempunyai kekuatan mewakili pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang dan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini juga mempengaruhi pendapatan nasional negara yang bersangkutan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. (Takii, 2009) menyatakan mengenai tingkat pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kerja. Jika tingkat pendidikan rendah maka produktivitas tenaga kerja akan menurun sehingga semakin sedikit tenaga kerja yang masuk ke perusahaan, jumlah perusahaan yang menawarkan peluang kerja masih kecil, pendidikan kurang menguntungkan bagi pekerja karena rendahnya kesempatan kerja, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan.

Selain PDB dan pendidikan, lapangan kerja juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan bahwa konsep kependudukan adalah seluruh individu yang tinggal di suatu wilayah untuk tujuan menetap selama kurang lebih enam bulan. Jika terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas yang baik, maka kesempatan kerja di daerah tersebut akan meningkat. Di sisi lain (Todaro & Smith, 2009) menyatakan bahwa

rendahnya kualitas justru menjadi masalah kependudukan terkait penyerapan tenaga kerja. Pesatnya pertumbuhan angkatan kerja didukung oleh beberapa faktor yaitu, perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang masih tinggi melebihi perkembangan ibu kota negara itu sendiri, dan adanya bonus demografi menyebabkan banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Namun hal ini terhambat oleh kurangnya pengembangan industri dan kurangnya keterampilan dan kompetensi (Sari et al., 2016)

Teori pertumbuhan neoklasik (Izushi & Huggins, 2004) menyatakan bahwa penentu laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah akumulasi faktor input seperti modal fisik dan tenaga kerja. Kajian ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi kemajuan teknologi yang diartikan sebagai faktor eksogen (Izushi & Huggins, 2004) menyatakan bahwa Thoreau pada tahun 1957 dan Swann pada tahun 1956 adalah dua orang pertama yang mengajukan teori ini. Inti model neoklasik adalah fungsi produksi agregat, yang mewakili pengembalian konstan terhadap skala tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain. Fungsi ini biasa dinyatakan sebagai $Y = F(K, L)$, dimana Y adalah produksi atau pendapatan, K adalah persediaan modal, dan L adalah tenaga kerja. Dengan asumsi skala hasil konstan, rasio setiap unit tenaga kerja terhadap modal dalam produksi tidak mengubah jumlah modal atau tenaga kerja dalam perekonomian. Model Frankel AK mempertimbangkan teknologi dan modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi dan menganggap pengetahuan sebagai modal yang terpisah dari pemiliknya. Dalam model asli Frankel AK dan model asli Romer, peran sumber daya manusia tidak jelas.

Kajian Teori

Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan Neo klasik seperti yang dinyatakan oleh (Izushi & Huggins, 2004) bahwa faktor-faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui akumulasi faktor input seperti modal fisik dan tenaga kerja. Penelitian menampakkan kontribusi signifikan dari kemajuan teknik, yang didefinisikan sebagai suatu faktor exogen. bahwa Solow pada tahun 1957 dan Swan pada tahun 1956 merupakan dua orang pertama yang mengemukakan teori ini. Inti dari Model neoklasik adalah fungsi produksi agregat yang menunjukkan constant return to scale pada labor dan modal untuk memproduksi barang lain. Fungsi tersebut secara umum dinyatakan dengan $Y = F(K, L)$ dimana Y adalah output atau income, K adalah stock modal, dan L adalah angkatan kerja. Dengan asumsi constant-returns-to-scale hubungan masing-masing unit labor dengan modal dalam produksi tidak merubah jumlah modal atau tenaga kerja pada perekonomian.

Model Frankel AK mempertimbangkan teknologi dan modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi, dengan menganggap ilmu pengetahuan sebagai modal yang terpisah dari pemiliknya. Izushi mengemukakan bahwa (Romer, 1986) memperbaiki model dengan memaksimalkan utility seumur hidup dengan suatu fungsi utility sementara. Pada model awal Frankel AK dan model pertama Romer tidak mengexplicitkan peranan human capital.

Kesempatan Kerja

Menurut (Simanjuntak, 2001) kesempatan kerja adalah tersedianya kesempatan kerja sehingga semua orang yang dapat bekerja pada proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan bakatnya. Alternatifnya, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, karena kesempatan kerja adalah kondisi yang menyatakan tersedianya lapangan kerja. Teori-teori yang membahas peluang kerja antara lain:

Teori Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemakmuran perekonomian ditentukan oleh derajat pertumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan produksi nasional. Perubahan kinerja perekonomian merupakan analisis perekonomian dalam jangka pendek. Menurut (Todaro, 2009), pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga komponen.

(1) akumulasi modal dalam bentuk investasi baru dalam segala bentuk atau jenis seperti tanah, peralatan fisik, sumber daya manusia, dan lain-lain; (2) pertumbuhan ekonomi bergantung pada angkatan kerja di masa depan; dan (3) kemajuan teknologi.

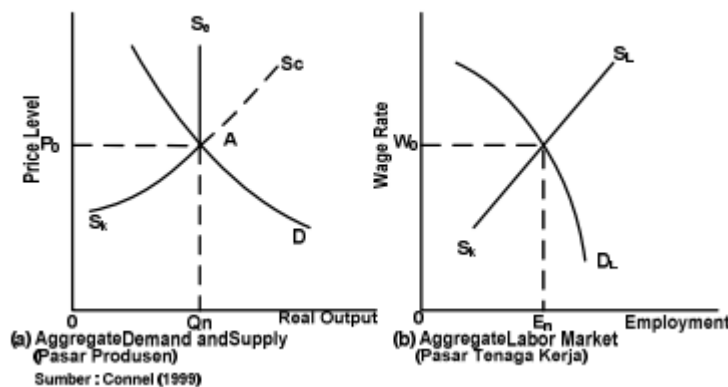
Menurut Kuznets (Alin et al., 2019) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan

jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi bagi warganya. Peningkatan kapasitas ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, ideologi atau adaptasi terhadap tuntutan situasi yang ada. Teori Harrod-Domar (Astuti, 2018) menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, sehingga diperlukan permintaan yang lebih besar untuk mencegah penurunan produksi. Apabila peningkatan kapasitas produksi tidak dibarengi dengan peningkatan permintaan, maka akan timbul surplus dan akibatnya produksi menurun. Peran modal fisik dalam model pertumbuhan sangat besar, namun kapasitas produktif hanya meningkat jika sumber daya lain (modal fisik) meningkat. Sebaliknya, meskipun jumlah penduduk besar, pendapatan per kapita tidak akan berkurang selama modal fisik meningkat. Diasumsikan bahwa populasi pekerja tumbuh secara eksponensial dan kesempatan kerja penuh selalu tercapai.

Teori Employment

Teori Employment yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (Santi, 2015) dalam bukunya, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, menjelaskan hubungan jangka pendek di mana tingkat lapangan kerja jangka pendek bergantung pada produk dan total permintaan efektif untuk produk tersebut. Dalam menentukan tingkat lapangan kerja, faktor-faktor produksi seperti barang modal, pasokan tenaga kerja, teknologi, dan efisiensi tenaga kerja diasumsikan tidak berubah. Oleh karena itu, menurut Keynes, tingkat lapangan kerja bergantung pada pendapatan dan produksi nasional, sehingga penentuan lapangan kerja disebut dengan teori determinasi pendapatan. Model makroekonomi yang dikemukakan oleh (Connel, 1999) menunjukkan hubungan antara output riil dan penentuan lapangan kerja agregat, seperti terlihat pada gambar di atas. Perpotongan permintaan agregat dan penawaran agregat pada kurva D , S_k , dan $A S_c$ pada Gambar (a) menghasilkan keseimbangan harga dan output P_0 dan Q_n .

Ketenagakerjaan seperti ditunjukkan pada Gambar (b), keseimbangan antara tingkat upah dan total lapangan kerja ditentukan oleh perpotongan kurva penawaran dan permintaan agregat di pasar tenaga kerja. Tingkat lapangan kerja alami E_n adalah input tenaga kerja atau jumlah pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan output alami riil sebesar Q_n



Kependudukan

Teori kependudukan berdasarkan model (Mankiw, 2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terus membebani kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. (Mankiw, 2006) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memberikan tekanan pada sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produksi pangan. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk dipandang sebagai ancaman terhadap peningkatan taraf hidup. Di sisi lain, menurut (Mankiw, 2000) seharusnya jumlah penduduk bertambah seiring bertambahnya sumber daya produktif, khususnya sumber daya alam, namun kenyataannya kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang tersedia bagi manusia cenderung menurun, dan sebaliknya jumlah penduduk semakin menurun.

PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara adalah laju pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB). PDRB merupakan

hasil bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya setiap tahun. (Soebagiyo, 2007)

Empat pendekatan dapat digunakan untuk menghitung PDRB:

- Metode pendekatan produksi
- Metode pendekatan produk
- Metode pendekatan pengeluaran
- Metode pendekatan alokasi

Human Capital (Tingkat Pendidikan)

Teori human capital berasumsi bahwa manusia dipandang sebagai suatu bentuk modal atau barang modal lainnya. Menurut Becker (1993), pendidikan dapat membekali pekerja dengan keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi lebih produktif dan memperoleh pendapatan lebih tinggi. Kualitas pegawai diharapkan meningkat melalui peningkatan pelatihan pegawai. Sedangkan menurut Todaro (Arifin, 2023) konsep human capital sendiri merupakan investasi yang bertujuan untuk mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa depan dalam bentuk investasi yaitu pendidikan dan kesehatan.

Semakin berpendidikan seseorang atau semakin banyak pelatihan yang diterimanya maka semakin tinggi keterampilan dan kemampuannya, namun tanpa tubuh yang sehat maka pendidikan tinggi tidak akan meningkatkan produktivitas; Kesehatan dan pendidikan merupakan bidang yang berkaitan karena mempengaruhi kesehatan orang itu sendiri. Pengukuran indikator pendidikan terdiri dari dua komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis aksara Latin dan lainnya. Rata-rata lama bersekolah dinyatakan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan dalam pendidikan formal oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama bersekolah dapat menjelaskan kualitas pendidikan, seperti mahasiswa sarjana dan pascasarjana dengan keterampilan berbeda yang mempengaruhi tingkat produktivitas.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian kuantitatif dan diskriptif. Penelitian ini menguji keterkaitan atau hubungan antara dua variabel atau lebih dengan metode analisa yang disajikan berupa angka-angka dalam bentuk data dengan menambahkan kalimat penjelas dan data yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dengan menggunakan regresi panel, data diambil dari 33 kabupaten/kota Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2019-2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Effect Test	Statistic	df	Prob
Cross-section F	40.973865	(32,95)	0.0000
Cross-section Chi square	353.011410	32	0.0000

Pada Tabel uji Chow diatas, nilai prob Cross Section F dan Chi Square lebih kecil dari taraf Alpha 5%. Sehingga model terbaik yang dipakai adalah (FEM). Berdasarkan hasil Chow test yang menolak pengujian CEM, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic.	Chi-Sq df	Prob
Cross-section random	362.372385	3	0.0000

Berdasarkan pengujian uji Hausman diatas, nilai prob (p) untuk Cross-Section Random. Jika nilai p lebih besar dari taraf alpha 5% maka model yang terpilih adalah model REM. Tetapi jika Prob < 5% maka model yang dipilih adalah model FEM.

Uji Multikolinearitas

	Jumlah Penduduk	PDRB	Pendidikan
Jumlah Penduduk	1.000000	0.006478	0.278205
PDRB	0.006478	1.000000	-0.107077
Pendidikan	0.278205	-0.107077	1.000000

Berdasarkan pengujian multikolinearitas diatas, nilai VIF ketiga variabel berada < 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Variable.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	11454.10	27635.91	0.414464	0.6795
Jumlah Penduduk	0.008729	0.014153	0.616781	0.5389
PDRB	237.4906	172.3535	1.377927	0.1715
Pendidikan	-1195.133	3067.320	-0.389634	0.6977

Berdasarkan pengujian Heteroskedastisitas diatas, nilai Prob. lebih besar dari taraf alpha 5%, maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji.

Model FEM

Variable.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-16325.38	50419.49	-0.323791	0.7468
Jumlah Penduduk	-0.070307	0.025821	-2.722828	0.0077
PDRB	991.7597	314.4451	3.153999	0.0002
Pendidikan	27783.13	5596.078	4.964750	0.0000
R-squared.		0.998746		
Adjusted R-Squared		0.998284		
F-statistic		2161.206		
Prob(F-statistic)		0.000000		

Berdasarkan tabel penelitian dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Jumlah Penduduk}_{it} + \beta_2 \text{PDRB}_{it} + \beta_3 \text{Pendidikan}_{it} + e_{it}$$
$$Y = -16325.38 - 0.070307 + 991.7597 + 27783.13 e_{it}$$

Dimana:

- β_0
 β_1 Jumlah Penduduk
 β_2 PDRB
 β_3 Pendidikan
e
i
t
- = Konstanta
= Koefisien Regresi Jumlah Penduduk
= Koefisien PDRB
= Koefisien Regresi Pendidikan
= error
= Cross-section Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara
= Time Series (2019-2022)

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kesempatan Kerja

Hasil pengujian untuk variabel Jumlah penduduk menunjukkan bahwa, jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara, dan signifikan. Teori Harrod Domar dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Penduduk (dalam hal angkatan kerja) diasumsikan meningkat secara geometris dan full employment selalu tercapai. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan dukungan jumlah penduduk, khususnya penduduk usia produktif yang bekerja semakin meningkat, maka dapat mendorong serta mempercepat pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor. Namun pendapat tersebut berbeda dengan Malthus mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang besar cenderung mengurangi hasil pembangunan ekonomi, karena dalam modal ini, output nya dinyatakan dalam per kapita atau per pekerja.

Pengaruh PDRB terhadap Kesempatan Kerja

Hasil pengujian variabel PDRB menunjukkan bahwa, PDRB berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Hadiyanti, 2020), dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Istiyani et al., 2022) mendapat hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Pengaruh positif dari variabel independen mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang searah diantara variabel PDRB dengan kesempatan kerja. Artinya, semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi yang ada di kabupaten atau kota di Sumatera Utara maka semakin tinggi tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja

Hasil Pengujian Variabel Pendidikan menunjukkan bahwa, pendidikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara dan Signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fara Eka Wahyuni et al., 2021) dan (Fahrizal et al., 2021) yang mendapat hasil bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Tingkat pendidikan menjadi faktor yang menentukan bertambah atau berkurangnya kesempatan kerja. Rendahnya tingkat pendidikan akan menyebabkan kualitas dan kuantitas output produksi yang rendah, sehingga berpengaruh pada kesempatan kerja yang rendah. Namun ketika tingkat pendidikan seseorang/pekerja semakin tinggi mencapai tingkat pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, maka kesempatan kerja yang diperoleh akan semakin baik, karena pendidikan merupakan cerminan kualitas seseorang akan suatu pekerjaan ketika memasuki dunia kerja. Sebaliknya jika pendidikan seseorang rendah, maka kesempatan kerja/pekerjaan yang dia peroleh akan semakin rendah, karena diiringi dengan rendahnya skill/kualitas kerja yang dimilikinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara. Dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Saran

Perlu melakukan kajian yang sama dengan menambah variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kesempatan dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, N. F., Heriberta, H., & Umiyati, E. (2019). Fakta empiris kurva U-terbalik Kuznets mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 9–16. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6788>
- Arifin, A. S. (2023). Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 174–179. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4672>
- Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 11. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4629/4058>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital* (Third). The University Of Chicago Press.
- Connel, C. R. (1999). *Contemporary Labor Economics*. Mc Graw Hill.
- Fahrizal, F., Zamzami, Z., & Safri, M. (2021). Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 167–190. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11825>
- Fara Eka Wahyuni, F. E. W., Riyanto, W. H., & Sulistyono, S. W. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 1995-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 551–562. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18729>
- Istiyani, N., Viphindartin, S., Nurhardj, B., & Restiawan, A. I. (2022). Analisis Pdrb, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Istiqro*, 8(2), 121–128. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1545>
- Izushi, H., & Huggins, R. (2004). Empirical analysis of human capital development and economic growth in European regions. *Impact of Education and Training: Third Report on Vocational Training Research in Europe: Background Report*, 30, 71–118.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi* (4th ed.). Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. salmba empat.
- Marshall, R. (2005). *Labor Standards, Human Capital, and Economic Development (EPI Working Paper #271)*. 271.
- Pratama, D. R., & Hadiyanti, S. U. E. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Borneo Student Research*, 1(2), 800–805.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Santi, F. (2015). Review dan Kritikal Jurnal: Keynes' Theory of Liquidity Preference and His Debt Management and Monetary Policies. In *Jurnal Bisnis Darmajaya* (Vol. 1, Issue 2, pp. 1–8). <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/JurnalBisnis/article/view/492>
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Simanjuntak, P. J. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFE UI.
- Soebagiyo, D. (2007). Kausalitas Granger Pdrb Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Dati I Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.23917/jep.v8i2.1040>
- Takii, K. (2009). Entrepreneurial competition and its impact on the aggregate economy. *Journal of Economics/ Zeitschrift Fur Nationalokonomie*, 97(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s00712-008-0056-5>
- Todaro, M. P. (2009). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.

ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Nasrullah Hidayat, Muammar Rinaldi, Trisna Saputri, Nobel Indah Clawdya Zebua,
Darwin Sinaga

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

E-mail: trisasaputri0825@gmail.com, nasrullahhidayat816@yahoo.co.id, darwinsinaga532@gmail.com,
nobelzebua7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini masih menyisakan masalah klasik yaitu tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Salah satu unsur pertumbuhan ekonomi yang mendorong keberhasilannya adalah tenaga kerja. Komponen personel suatu perekonomian diperlukan untuk terwujudnya perekonomian dan hanya dapat memulai dan melaksanakan tujuan pembangunan yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Derajat perkembangan perekonomian suatu daerah dipengaruhi langsung oleh tenaga kerja yang merupakan salah satu modal utama dalam perekonomian. Memanfaatkan jumlah angkatan kerja tentu akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan negara. Pertumbuhan angkatan kerja dan populasi secara tradisional dipandang sebagai salah satu elemen yang mendorong pembangunan ekonomi dan nasional. Pertumbuhan angkatan kerja dan populasi secara tradisional dipandang sebagai salah satu elemen yang mendorong pembangunan ekonomi dan nasional. Salah satu negara yang mengalami masalah ketenagakerjaan adalah Indonesia, negara yang sedang berkembang.

Kata Kunci— Tenaga kerja, modal asing dan upah minimum

ABSTRACT

This research aims to analyze how economic development in Indonesia today still leaves behind the classic problem, namely a fairly high unemployment rate. One element of economic growth that drives its success is labor. The personnel component of an economy is necessary for the realization of the economy and can only initiate and implement development goals that will lead to economic development. The degree of economic development of a region is directly influenced by labor which is one of the main capital in the economy. Utilizing the workforce will certainly accelerate the country's growth and development. Growth in the labor force and population has traditionally been seen as one of the elements that drives economic and national development. Growth in the labor force and population has traditionally been seen as one of the elements that drives economic and national development. One country experiencing employment problems is Indonesia, a developing country.

Keywords— Labor, foreign capital and minimum wages

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini masih menyisakan masalah klasik yaitu tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Salah satu unsur pertumbuhan ekonomi yang mendorong keberhasilannya adalah tenaga kerja. Komponen personel suatu perekonomian diperlukan untuk terwujudnya perekonomian dan hanya dapat memulai dan melaksanakan tujuan pembangunan yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Derajat perkembangan perekonomian suatu daerah dipengaruhi langsung oleh tenaga kerja yang merupakan salah satu modal utama dalam perekonomian. Memanfaatkan jumlah angkatan kerja tentu akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan negara. Pertumbuhan angkatan kerja dan populasi secara tradisional dipandang sebagai salah satu elemen yang mendorong pembangunan ekonomi dan nasional. Pertumbuhan angkatan kerja dan populasi secara tradisional dipandang sebagai

salah satu elemen yang mendorong pembangunan ekonomi dan nasional. Salah satu negara yang mengalami masalah ketenagakerjaan adalah Indonesia, negara yang sedang berkembang. Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi kesulitan tenaga kerja. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan jumlah angkatan kerja, dan mempengaruhi distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh pendapatan riil per kapita. Tujuan utama proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup (pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas pendidikan), meningkatkan ketersediaan dan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok, dan memperluas pilihan sosial dan ekonomi (Arsyad, 2010).

Kebijakan upah minimum dan permasalahan penyerapan tenaga kerja mempunyai keterkaitan yang erat. Salah satu biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen sebagai imbalan atas tugas produksi padat karya yang dilakukan pekerja adalah upah. Upah dipandang sebagai biaya pekerjaan dalam hipotesis permintaan tenaga kerja. Dalam konteks ilmu ekonomi, permintaan adalah jumlah terbesar suatu barang atau jasa yang bersedia diperoleh oleh pelanggan dengan harga berapa pun dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Hubungan antara tingkat gaji dan jumlah orang yang ingin dipekerjakan oleh perusahaan dikenal sebagai permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Penanaman modal asing merupakan faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja selain upah minimum. Sukirno Sadono (2000) menegaskan bahwa strategi investasi yang berhasil dapat menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas perekonomian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan menguntungkan terhadap penyerapan tenaga kerja. Teori ini mendukung pernyataan yang dibuat oleh (Haroon, 2011) bahwa semua negara mempromosikan investasi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru, dan lain-lain. Banyak hal baik yang akan diperoleh dari hal ini, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan pendapatan individu, peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kajian Literatur

Upah Minimum

Jumlah gaji terendah yang masih dapat diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya adalah upah minimum. Artinya, upah yang diterima pekerja tidak boleh kurang dari upah minimum yang ditetapkan. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3, Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:

- 1) Upah tanpa tunjangan; atau
- 2) Upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah pokok paling sedikit harus sebesar upah minimum apabila komponen pengupahan perusahaan terdiri atas tunjangan tidak tetap dan upah pokok. Merupakan pelanggaran hukum bagi pengusaha untuk membayar karyawannya kurang dari upah minimum.

Pasal 24 mengatur bahwa Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan berhak memperoleh upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). Struktur dan skala upah menjadi pedoman pengupahan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja 1 (satu) tahun atau lebih.

Pada pasal 25 menyebutkan Upah minimum terdiri atas:

- 1) Upah minimum provinsi
- 2) Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Perekonomian dan pasar kerja menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Variabel-variabel berikut ini termasuk dalam kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- 1) Paritas daya beli
- 2) Tingkat penyerapan tenaga kerja

3) Median Upah.

Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Menurut Payaman J. Simanjuntak, menaikkan upah minimum akan berdampak besar pada dunia usaha karena mereka akan mempekerjakan lebih banyak karyawan yang berkualifikasi tinggi dan produktif yang mampu mendapatkan upah lebih tinggi.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yaitu kegiatan menanam modal dilakukan si penanam modal asing, baik dengan menggunakan modal asing ataupun dengan gabungan modal dalam negeri, sehingga dapat membangun usaha di wilayah negara yang akan di tanamkan modalnya. Penanam modal asing ialah investasi yang dilakukan oleh pengusaha negara lain, badan usaha lain dan pemerintah luar di wilayah negara Republik Indonesia. (A. Rahayu, 2019).

Tenaga Kerja

Menurut Murti, tenaga kerja adalah perbuatan seseorang yang menawarkan keterampilan atau kemampuannya untuk menciptakan barang dengan imbalan bayaran atau kompensasi, sedangkan usaha tersebut memperoleh keuntungan dengan memperoleh keuntungan. Menurut penafsiran ini, pekerja adalah orang-orang yang mampu menghasilkan barang-barang yang dapat dijadikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Karyawan sangat penting dalam setiap proses produksi perusahaan karena pada akhirnya semua bahan baku (SDA) hanya bernilai jika ditangani dengan baik oleh manusia. Tidak setiap anggota masyarakat memenuhi syarat sebagai pekerja sebagai komponen produksi. Usia kerja yang sah di Indonesia adalah antara usia 15 dan 64 tahun, berdasarkan undang-undang pemerintah. Yang dimaksud dengan “penyerapan tenaga kerja” adalah meningkatnya terisinya kesempatan kerja yang berdampak pada semakin tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu organisasi atau instansi. Todaro mengartikan penyerapan tenaga kerja sebagai keadaan dimana peluang kerja terbuka bagi angkatan kerja atau dimana pekerja bersedia mengambil pekerjaan sebagaimana yang dilakukannya (pekerjaan). Penduduk yang berhasil berasimilasi akan bekerja dan memegang peran tertentu. Ketersediaan tenaga kerja jelas merupakan faktor kemampuan penduduk dalam menyerap pekerjaan di berbagai industri dan peluang kerja. Kuncoro mengatakan, dengan demikian penyerapan tenaga kerja juga dapat mengindikasikan adanya kebutuhan akan tenaga kerja.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian kausal. Menurut Umar (2008), desain kausal berguna dalam penelitian eksperimental dimana variabel independen ditangani secara terkendali oleh peneliti untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hal ini juga berguna dalam menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Russiandi (2013:14) adalah penelitian yang berupaya memastikan kekuatan keterkaitan dan pola atau bentuk pengaruh antara dua variabel atau lebih. Sebuah teori yang berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengatur suatu fenomena akan dikembangkan melalui penelitian ini.

B. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Indonesia. Pengolahan data ini menggunakan program eviews 12. Data tersebut berupa laporan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Provinsi Sumber penelitian ini yaitu www.bps.go.id. Periode data penelitian ini meliputi data

dari tahun 2010 sampai 2020. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil OLS (*Ordinary Least Square*).

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Negara Indonesia.

D. Rumus-rumus penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu Penanaman Modal Asing (X1) dan Upah Minimum Provinsi (X2) serta Tenaga Kerja (Y) sebagai variabel dependen.

Adapun perhitungan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Model Matematika

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

- Y = Tenaga Kerja
- X1 = Penanaman Modal Asing
- X2 = UMP (Upah Minimum Provinsi)
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi Var. X1
- β_2 = Koefisien Regresi Var. X2

2. Model Ekonometrika

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$ (1)

model ekonometrika ditransformasikan kedalam bentuk logaritma sebagai berikut :

$\text{Log}(Y) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(X_1) + \beta_2 \text{Log}(X_2) + e$ (2)

Keterangan :

- Y = Tenaga Kerja
- X1 = Penanaman Modal Asing
- X2 = UMP (Upah Minimum Provinsi)
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi Var. X1
- β_2 = Koefisien Regresi Var. X2
- e = Error Te

Penelitian ini juga menggunakan uji persyaratan analisis dengan menguji yakni :

1. Normalitas
Untuk menentukan apakah error term mendekati distribusi normal, pengujian ini dilakukan. Standar pengujian yang diterapkan:
a) Dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal atau model tidak mempunyai masalah normalitas jika nilai probabilitas Jarque Bera mencapai $\geq$ taraf nyata (α).
b) Model mengalami masalah kenormalan, atau error term tidak terdistribusi normal, jika diperoleh nilai probabilitas Jarque Bera $<$ taraf nyata (α).
2. Autokorelasi
Menurut Kendall dan Buckland dalam Gujarati (1997), autokorelasi adalah korelasi antar anggota observasi yang disusun baik secara spasial (data lintas sektoral) maupun temporal (data seri periodik). Jika terjadi autokorelasi maka estimator OLS tidak lagi efisien atau variansnya tidak lagi minimal, seperti yang terjadi pada masalah heteroskedastisitas. Uji LM Korelasi Serial Breusch-Godfrey dapat digunakan untuk menentukan apakah ada autokorelasi.
 - Probabilitas Obs*R-squared $<$ taraf nyata α , maka terdapat autokorelasi
 - Probabilitas Obs*R-squared $>$ taraf nyata α , maka tidak terdapat autokorelasi.
3. Multikolinearitas
Ketika terdapat korelasi yang nyata antara variabel-variabel independen dalam regresi berganda, atau ketika tidak ada hubungan sama sekali, maka timbullah multikolinearitas. Jika anggapan ini dilanggar, maka akan lebih sulit untuk mengantisipasi hasil yang diharapkan. Anda harus memperhatikan hasil probabilitas t-statistik dari hasil regresi

untuk menentukan apakah ada multikolinearitas (Gujarati, 1997). Multikolinearitas diindikasikan jika sejumlah besar koefisien parameter yang dihitung menghasilkan temuan yang dapat diabaikan.

4. Heteroskedastisitas

Jika suatu fungsi memiliki rentang kesalahan yang sama atau memenuhi asumsi homoskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas), maka dianggap sangat baik. Parameter yang dihitung akan menjadi tidak efisien jika terdapat heteroskedastisitas. Penduga Ordinary Least Square (OLS) tetap tidak dapat diprediksi dan konsisten ketika terdapat heteroskedastisitas, namun kehilangan efisiensi asimtotiknya baik untuk sampel kecil maupun besar (Gujarati, 1997).

Gejala heteroskedastisitas akan muncul jika H_0 ditolak, begitu pula sebaliknya jika H_0 diterima maka tidak akan terwujud.

Sedangkan untuk uji signifikansi menggunakan yakni:

- 1. Uji Simultan
- 2. Uji Parsial
- 3. Koefisien Determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1
Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Provinsi

Tahun	TK	pma	ump
2010	116,5	16.214,8	908,824
2011	117,4	19.474,5	988,829
2012	118,0	24.564,7	1.088,903
2013	118,2	28.617,5	1.296,908
2014	125,3	28.529,7	1.584,391
2015	122,4	29.275,9	1.790,342
2016	125,44	28.964,1	1.997,819
2017	128,06	32.239,8	3.355,750
2018	133,94	29.307,9	2.268,874
2019	136,18	28.208,8	2.455,662
2020	138,22	28.666,3	2.672,371

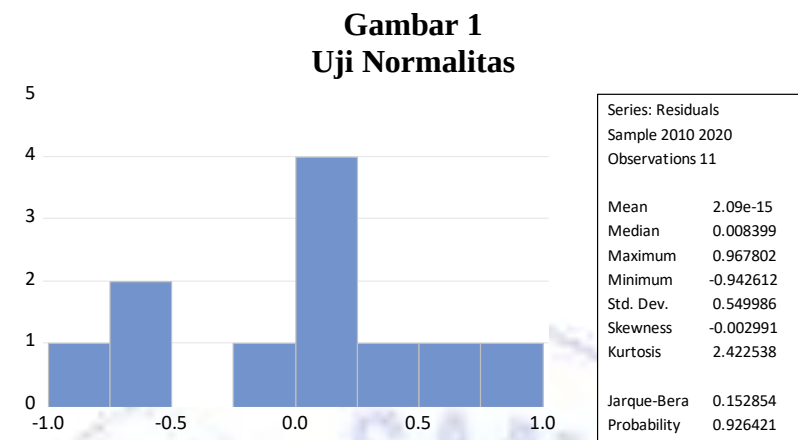
Sumber: BPS, diolah

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi penting untuk memantau penyimpangan dari asumsi klasik. Sebab, jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel penjelas menjadi tidak efektif. Model regresi dalam penelitian ini melalui beberapa uji asumsi tradisional setelah diolah dengan software Eviews 12. Tes-tes ini termasuk:

1. Uji Normalitas

Kami mempertimbangkan Probabilitas dan Jerque-Bera untuk mengambil keputusan. Dalam kebanyakan kasus, $\alpha = 0,05$ (5%), yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara teratur, digunakan dalam penelitian ekonomi dan bisnis. Probabilitas yang lebih besar dari α menunjukkan kumpulan data yang terdistribusi secara teratur. Pengolahan menunjukkan bahwa data penelitian mempunyai distribusi normal karena $0,152854 > 0,05$.



Sumber: Data diolah eviews 12

Data yang diperoleh dapat diolah dengan teknik selanjutnya karena hasil pengolahan data menunjukkan bahwa seluruh data berdistribusi normal dan tidak ada penyimpangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tujuan pengujian multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam model regresi mempunyai korelasi satu sama lain. Seharusnya tidak ada hubungan apa pun antara variabel independen dalam model regresi yang layak.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/04/23 Time: 23:01			
Sample: 2010 2020			
Included observations: 11			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(PMA)	2.516865	7585.000	2.855032
LOG(UMP)	0.575243	929.8778	2.855032
C	145.6086	4236.099	NA

Sumber: Data diolah eviews 12

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas Breusch Pagan Godfrey dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dapat diasumsikan muncul pada model regresi jika $p\text{-value obs}^*\text{-square} < \alpha$. Sebaliknya jika $p\text{-value obs}^*\text{-square}$ lebih besar dari α maka dibuktikan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi. Dapat diasumsikan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi yang akan dilihat karena $p\text{ value-obs}^*\text{-square} = 0,3685 > 0,05$. Hasilnya model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.887073	Prob. F(2,8)	0.4488
Obs*R-squared	1.996656	Prob. Chi-Square(2)	0.3685
Scaled explained SS	0.751159	Prob. Chi-Square(2)	0.6869

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/04/23 Time: 23:10

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.811775	6.827887	-1.144098	0.2857
LOG(PMA)	0.870329	0.897682	0.969529	0.3607
LOG(UMP)	-0.103416	0.429159	-0.240974	0.8156

R-squared	0.181514	Mean dependent var	0.274986
Adjusted R-squared	-0.023107	S.D. dependent var	0.343985
S.E. of regression	0.347936	Akaike info criterion	0.953405
Sum squared resid	0.968477	Schwarz criterion	1.061922
Log likelihood	-2.243730	Hannan-Quinn criter.	0.885001
F-statistic	0.887073	Durbin-Watson stat	1.092512
Prob(F-statistic)	0.448791		

Sumber: Data diolah eviews 12

4 .Uji Autokorelasi

Korelasi yang terdapat antara residu suatu pengamatan dengan data lain dalam model regresi merupakan asumsi baku autokorelasi, dan uji autokorelasi digunakan untuk memastikan apakah asumsi tersebut menyimpang atau tidak. Model regresi harus bebas dari autokorelasi agar persyaratannya terpenuhi. Uji LM Korelasi Serial Breush-Godfrey digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Terdapat korelasi serial dalam model regresi jika p-value obs*-square < α . Sebaliknya, tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi jika p-value obs*-square > α . Diketahui tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang diteliti karena nilai p - obs*-square = 0,3945> 0,05. Hasilnya model regresi tidak menyertakan autokorelasi pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.610568	Prob. F(2,6)	0.5736
Obs*R-squared	1.860163	Prob. Chi-Square(2)	0.3945

Sumber : Data diolah eviews 12

Analisis Regresi Linier Berganda dan Persamaan Regresi

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan dua (dua) faktor penjelas yang mempengaruhi Tenaga Kerja (variabel terikat). Teknik backward diterapkan dalam penelitian regresi ini. Menurut metode ini, semua variabel independen diuji terlebih dahulu dan kemudian dieliminasi satu per satu jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05. Ketika variabel dihapus, tabel keluaran berikutnya akan menampilkan tahapan atau proses; setiap baris akan memiliki nomor yang menunjukkan tahapan atau proses selesai. Kita hanya akan membahas baris terakhir atau prosedur terakhir pada setiap tabel dalam pembahasan bab ini karena setiap baris terakhir mewakili hasil pengujian akhir, yaitu variabel dengan nilai signifikan t kurang dari 0,05.

Tabel 5
Persamaan Regresi

Dependent Variable: TK
Method: Least Squares
Date: 11/05/23 Time: 15:43
Sample: 2010 2020
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PMA	-0.313906	0.355759	-0.882356	0.4033
UMP	8.334805	2.181353	3.820933	0.0051
C	-402.9049	7044.293	-0.057196	0.9558

R-squared	0.750882	Mean dependent var	6669.273
Adjusted R-squared	0.688603	S.D. dependent var	6297.336
S.E. of regression	3514.100	Akaike info criterion	19.39396
Sum squared resid	98791203	Schwarz criterion	19.50247
Log likelihood	-103.6668	Hannan-Quinn criter.	19.32555
F-statistic	12.05667	Durbin-Watson stat	2.839558
Prob(F-statistic)	0.003851		

Sumber: Data diolah eviews 12

Didapat model regresi yang dirumuskan sebagai berikut:

$Y = -402.9049 - 0.313906 \cdot X_1 + 8.334805 \cdot X_2$

Keterangan:

- X1= Penanaman Modal Asing
- X2= Upah Minimum Provinsi
- Y = Tenaga Kerja

Pembahasan

Pengujian hipotesis di atas dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa fenomena seperti penanaman modal asing (X1) dan dampak upah minimum provinsi (X2) terhadap tenaga kerja (Y) di Indonesia, terhadap hubungan masing-masing variabel independen (bebas). dan variabel terikat (terikat). Ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh nilai uji t parsial atau individual dari variabel Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Asing.

Temuan analisis regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia terkena dampak signifikan dan negatif dari variabel penanaman modal asing. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masuknya uang asing akan menghasilkan angkatan kerja yang lebih besar dan kaya.

Selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berdampak positif dan signifikan terhadap pekerja di Indonesia. Hal ini disebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun setiap kenaikan upah minimum sebesar 1%. Hal ini mungkin berarti bahwa semakin sedikit penduduk berpendidikan rendah yang akan bekerja di sektor industri untuk setiap kenaikan gaji minimum sebesar Rp 100.000.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tenaga kerja Indonesia terkena dampak negatif dan signifikan dari investasi asing.
2. Pekerja di Indonesia terkena dampak positif dan signifikan dari Upah Minimum Provinsi.
3. Gabungan gaji minimum provinsi dan investasi asing terhadap tenaga kerja di Indonesia mempunyai dampak yang besar.

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan dari penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Pemerintah Indonesia agar lebih gencar meningkatkan

Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum agar penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Puji, H. (2017). Pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.
- Raharjanti, A. V. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur pada 33 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2014-2017. Skripsi. http://eprints.undip.ac.id/72731/%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/72731/1/03_RA HARJANTI.pdf
- Rahayu, A. (2019). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Samarinda. Riset / 3500 JURNAL EKSIS, 14(2), 3436-3530. [27/11 08.39] ~: Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaung, A.
- T. N. (2019). Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(04), 72-83.
- Haroon, M. (2011). Peran Investasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi Pakistan. 420-439.
- ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, TENAGA KERJA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA. Hadi setiawan
- Pengaruh upah minimum provinsi dan tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat tahun 1988-2017
- Pengaruh Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Banten Periode 2010-2020
- ANALISIS DAMPAK UPAH MINIMUM DAN INVESTASI SEBAGAI LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA
- Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2016

ANALISIS KORELASI DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA), TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Junnely D. Busdan¹, Agnes L.Ch.P. Lopian², George M.V. Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fekultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : junebusdan1012@gmail.com, agneslopian@unsrat.ac.id, georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah kabupaten diantaranya terdapat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Objek penelitian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011-2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, peneliti menggunakan analisis korelasi Uji Korelasi Product Moment (Pearson). Dengan bantuan program EvIEWS versi 8.0. Hasil korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) ada hubungan secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada hubungan secara signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ada hubungan secara signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Belanja Modal.

Kata Kunci : Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Modal.

ABSTRACT

Sources of funding for carrying out activities from the district government include local original income, balancing funds, etc. From legitimate income. The research object is the report on the realization of the regional income and expenditure budget of the Southeast Minahasa Regency Regional Financial and Revenue Management Agency for 2011-2022. The research aimed to determine the correlation between Profit Sharing Funds (PSF), Original Regional Income (ORI), Surplus Budget Financing (SBF), and Capital Expenditures in Southeast Minahasa Regency, researchers used correlation analysis of the Product Moment Correlation Test (Pearson). With the help of the EViews version 8.0 program. The correlation results of Profit-Sharing Funds (PSF) with it is concluded that there is a significant relationship between Profit Sharing Funds (PSF) and Capital Expenditures. Original Regional Income (ORI) it can be concluded that there is a significant relationship between Original Regional Income (ORI) and Capital Expenditure. Surplus Budget Financing (SBF), it can be concluded that there is a significant relationship between Surplus Budget Financing (SBF) and Capital Expenditures.

Keywords: Profit Sharing Funds (PSF), Original Regional Income (ORI), Surplus Budget Financing (SBF), Capital Expenditures.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan

wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritas program atau proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan peraturan menteri perekonomian no 9 tahun 2022, saat ini pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 Proyek Strategis Nasional dan 12 Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi. Pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, hingga pendidikan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada, indikator yang paling mempengaruhi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, kegiatan pembangunan dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara menunjukkan perkembangan di berbagai bidang pembangunan dari tahun ke tahun, ini ditunjang dengan keberadaan sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Minahasa Tenggara, diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, sektor ekonomi pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan nilai LQ kedua tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu rata-rata sebesar 1,61. Aktivitas sektor ini meliputi seluruh kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, dan pengambilan semua jenis barang tersedia di alam. Dengan adanya pembangunan di daerah akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut, jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*). UU No 33 Tahun 2004 yang telah dicabut dan diganti dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Tujuan program otonomi daerah sendiri mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah (Sularno, 2013)¹. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain kewenangan terdapat sistem transfer antar level pemerintahan (Kuncoro, 2014)². Sementara itu, pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah berimplikasi terhadap peningkatan alokasi dana

¹ Sularno, 2013

² Kuncoro, 2014

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Perimbangan mengenai keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah pusat akan ideal jika disetiap pemerintahan bebas dalam pembiayaan untuk menjalankan otoritas dan kewajiban sendiri-sendiri akan dapat menciptakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal. Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah kabupaten diantaranya terdapat pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut (Nurul, 2013)³. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki dengan memaksimalkan sumber daya untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah dan bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung (permendagri no 25 tahun 2009) merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Darwanto & Yustikasari (2007) terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal, semakin tinggi PAD maka belanja modal akan tinggi. Adapun belanja langsung melalui belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja yang mampu mewujudkan bertambahnya infrastruktur dan sarana publik daerah. Adapun besaran alokasi belanja langsung dan belanja modal ditentukan dari seberapa besarnya PAD, sehingga daerah harus mengoptimalkan penerimaan PAD jika ingin meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal (Nuarisa 2013)⁴. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

³ Nurul, 2013⁴ Nuarisa, 2013

anggaran selama satu periode anggaran. Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya kemudian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Membedakan penelitian ini dari yang lain adalah data yang diambil berbeda kabupaten, dengan tahun penelitian yang berbeda, variabel yang diteliti ada empat variabel. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, berikut ini disajikan data awal Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2022.

Tabel 1
Dana Bagi hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap anggaran BELANJA MODAL
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

TAHUN	DBH (Jutaan Rupiah)	PAD (Jutaan Rupiah)	SILPA (Jutaan Rupiah)	BELANJA MODAL (Jutaan Rupiah)
2011	17.724	4.939	80.625	140.498
2012	18.718	4.810	57.541	124.643
2013	16.834	8.920	35.918	112.001
2014	17.620	14.633	70.310	183.108
2015	13.161	17.776	85.453	229.899
2016	15.258	19.286	74.696	311.528
2017	14.040	32.767	54.197	194.716
2018	14.703	18.632	44.920	158.495
2019	13.200	21.152	70.843	105.719
2020	11.902	17.451	67.460	172.759
2021	27.898	16.360	66.802	107.616
2022	32.425	13.686	33.506	113.304

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Dapat dilihat dari tabel 1 perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dan Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2011 sampai pada tahun 2022 terus menerus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), SILPA yang cukup signifikan di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membuat perekonomian juga ikut bergerak ke arah yang lebih dinamis, sehingga menimbulkan minat dari pelaku usaha maupun pemodal untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dana Bagi hasil (DBH) tiap tahun mengalami fluktuasi karena adanya kenaikan dan penurunan target penerimaan negara yang dibagihasilkan pada RAPBN yang disebabkan oleh perkiraan terjadinya penurunan harga komoditas minerba. Kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-

19 dimana 8% alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan Covid-19. Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara terkait dengan sedikitnya PAD, karena minimnya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendahnya kualitas SDM dibidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah yang mengakibatkan PAD rendah, dikarenakan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum tergali, seperti potensi kemaritiman dan kepariwisataan. Covid-19 memberikan dampak pada PAD karena beberapa sektor usaha dengan pendapatan pajak tinggi seperti restoran dan hotel mengalami penurunan pendapatan. Sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 26 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran. Pendapatan Retribusi Daerah juga mengalami penurunan karena untuk tempat rekreasi dan olahraga ditutup sementara selama masa pandemi Covid-19, dan petugas pelayanan parkir dialihkan ke penanganan Covid-19 untuk menjaga posko Covid-19. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi karena kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang telah dianggarkan, kelebihan alokasi dana, atau adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi anggaran. Dengan adanya Covid-19, terjadi refocusing anggaran sehingga menyebabkan perubahan dan pergeseran anggaran, keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah. Belanja Modal mengalami fluktuasi karena persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan dengan adanya Covid-19 pemerintah mengurangi Belanja Modal. Isu utama yang dihadapi adalah Covid-19, sehingga kebijakan setiap daerah lebih memfokuskan terhadap belanja program bidang kesehatan dan bantuan social. Terdapat gap antara kebijakan desentralisasi untuk pembangunan dengan upaya pembiayaan pembangunan yang berasal dari keuangan daerah, dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka isu strategis tentang ketimpangan keuangan vertical maupun horizontal, tingginya gap pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah serta pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas bisa teratasi, dengan adanya UU No 1 Tahun 2022 maka bisa mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal, melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan melalui penajaman peran pemda dalam menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah. Perubahan kebijakan dimaksud dilakukan dengan simplifikasi dan restrukturisasi jenis dan tarif pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program-program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pemerintah melakukan *redesign* pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka kajian dari penelitian ini penulis mengangkat judul ***“Analisis Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Minahasa Tenggara”***.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Bagaimana Korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara?

3. Bagaimana Korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara?

Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Mengetahui Korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Mengetahui Korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi pengkajian masalah dalam penelitian ini.
 - b. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori Akuntansi Sektor Publik (ASP).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, penelitian ini bisa mengoptimalkan potensi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan, dengan penelitian ini bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas daerah khususnya pelayanan asset.
 - b. Penelitian ini bisa memberikan referensi bagi pengembangan konsep mengenai bagaimana korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap anggaran belanja modal, korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal, korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap anggaran belanja modal.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

- **Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012)⁵ pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan.

- **Anggaran**

Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Abdullah (1995)⁶ anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja, (dan pembiayaan). Sedangkan Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Bastian (2001)⁷ anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

⁵ Halim, 2012

⁶ Abdullah, 1995

⁷ Bastian, 2001

- **Belanja Modal**

Belanja modal menurut Mardiasmo (2009)⁸ adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk

- **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Upaya memperkecil ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dilakukan melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang diikuti dengan implikasi pendanaan ke daerah. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, dimana DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar. UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah menurut Listiortini dalam (Susanti & Fahlevi, 2016)⁹. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Bagi Hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota, penyaluran Dana Bagi Hasil baik pajak maupun Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 23, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. UU No 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008)¹⁰. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002:55)¹¹. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat

⁸ Mardiasmo, 2009

⁹ Susanti & Fahlevi, 2016

¹⁰ Yani, 2008

¹¹ Suparmoko, 2002:55

sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009)¹². Bratakusuma & Solihin (2002)¹³ mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku, sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric 2017)¹⁴.

- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NNT dalam Nurachman, 2015)¹⁵. Dalam struktur APBD, terdapat penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Selisih antara penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran disebut surplus atau defisit. Surplus terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Jika sebaliknya maka disebut defisit. Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini disebut pembiayaan netto. SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

Penelitian Terdahulu

Margono (2021)¹⁶ dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA terhadap Belanja Modal, tujuan penelitian untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA terhadap Belanja Modal metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif, memakai data sekunder, menggunakan metode purposive sampling, hasil penelitian berdasarkan hasil riset Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai positif terhadap Belanja Modal dilihat dari hasil pengujian SPSS.

Tryas Chasbiandani, Rafrini Amyulianthy, Anisa May (2022)¹⁷ Vol 2 No 3 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini

¹² Darise, 2009

¹³ Bratakusuma & Solihin, 2002

¹⁴ Baldric, 2017

¹⁵ Nurachman, 2015

¹⁶ Margono, 2021

¹⁷ Tryas Chasbiandani dkk, 2022

menggunakan teknik regresi yaitu data panel yang artinya gabungan antar kedua jenis data yaitu data cross-section dan time series, hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Faisal Humiang, Hendrik Manossoh, Peter Kapojos (2022)¹⁸ Vol 5 No 2 dengan judul Analisis Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung, tujuan penelitian untuk mengetahui Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis deskriptif, hasil penelitian Pendapatan Asli daerah (PAD) memberikan kontribusi dengan kriteria baik pada alokasi belanja modal, Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan kontribusi dengan kriteria sedang, Dana Alokasi Umum (DAU) sangat baik, Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat baik.

Marselina A. Pekambani, M.E. Perseveranda, Rere P. Bibiana (2023)¹⁹ Vol 7 No 2 dengan judul *Effect of Local own source revenue, general allocation funds, special allocation funds, and profit-sharing funds on capital expenditure*, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil terhadap Belanja Modal, metode penelitian yang digunakan pengambilan sampel probabilitas, hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap Belanja Modal di Nusa Tenggara Timur.

Choms Gary Ganda Tua Sibarani, Jihen Ginting, Vivi Afriliani, Nasrullah Hidayat (2022)²⁰ Vol 3 No 2 dengan judul *Influence of Profit Sharing Funds and Regional Financial Performance in the Previous Year on the Allocation of Capital Expenditures in Provincial Governments in Indonesia in 2016 – 2020*, tujuan penelitian untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, rasio kemandirian daerah tahun sebelumnya, efektivitas tahun sebelumnya, keselarasan tahun sebelumnya, terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020, metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan uji deskriptif dengan metode asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim, Imam Novayandi (2021)²¹ dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal, tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal pada daerah Kab / Kota di Prov. Jawa Barat dan menggunakan 14 sampel Kab / Kota yang ada di prov. Jawa Barat yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data yang didapat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Dalam observasi ini memakai metode regresi linear berganda dengan uji hipotesis menggunakan t statistic, F statistic dan koefisien determinasi yang bersumber dari *Output Eviews 9.0*. Hasil penelitian ini memberikan informasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil Daerah (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

¹⁸ Faisal Humiang dkk, 2022

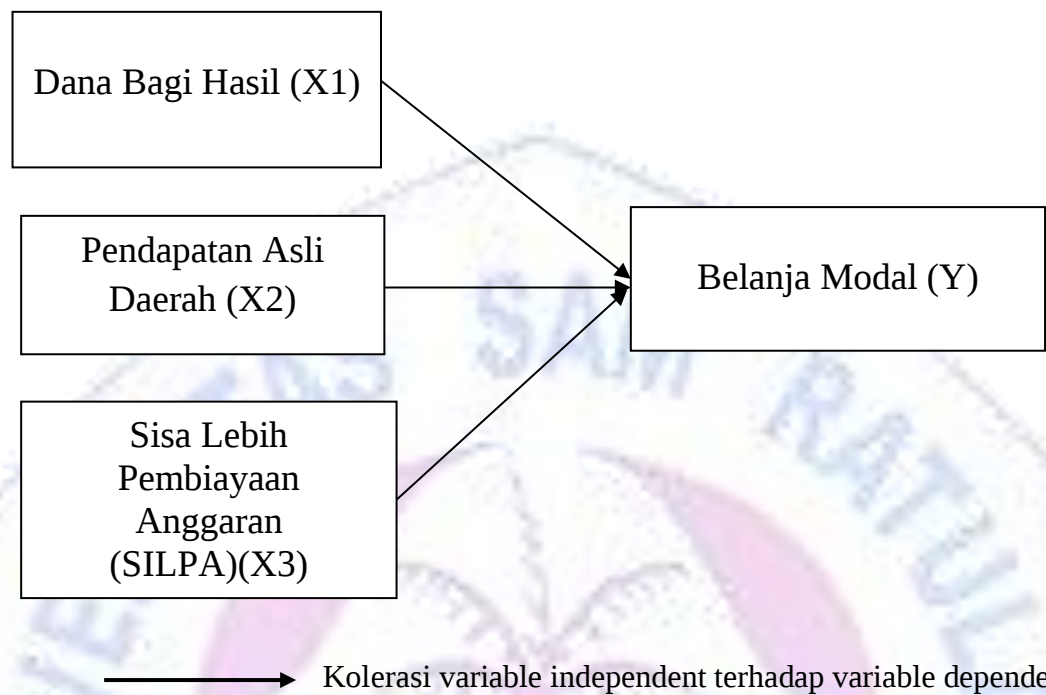
¹⁹ Marselina A. Pekambani dkk, 2023

²⁰ Choms Gary Ganda Tua Sibarani dkk, 2022

²¹ Dirvi Surya Abbas dkk, 2021

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

- **Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal**
H0 : Tidak ada hubungan korelasi antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
H1 : Ada hubungan korelasi antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
- **Korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**
H0 : Tidak ada hubungan korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
H1 : Ada hubungan korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- **Korelasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**
H0 : Tidak ada hubungan korelasi antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal
H1 : Ada hubungan korelasi antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional yang merupakan penelitian atau kajian deskriptif dimana peneliti tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabelnya tapi juga menguji sifat hubungan diantara variabel kuantitatif. (Setyosari : 2010)²², populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011-2022. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id), LRA Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang

²² Setyosari, 2020

mendukung penelitian, referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Modal, Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011 sampai 2022.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, pengukuran variabel Belanja Modal diukur dalam satuan Rupiah.
2. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) diukur dalam satuan Rupiah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dalam satuan Rupiah.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diukur dalam satuan Rupiah.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan metode interpolasi, metode analisis korelasi antara Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Dan Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara. Maka digunakan data sekunder yang bersumber dari LRA BPKPD Minahasa Tenggara Tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis korelasi Pearson Correlation Product Moment sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Analisis Interpolasi

Interpolasi data merupakan metode pemecahan data menjadi data triwulan atau bentuk kuartalan, dimana data setahun dibagi menjadi empat data dalam bentuk kuartalan.

Tabel 2

Data Kuartal Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Dana Bagi Hasil (DBH) x1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) x2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) x3	Belanja Modal y
2011Q1	4.180422	1.478664	22.40027	36.78662
2011Q2	4.377453	1.271898	20.88904	35.64507
2011Q3	4.529516	1.131367	19.40063	34.55373
2011Q4	4.636609	1.05707	17.93505	33.51259
2012Q1	4.698734	1.049008	16.4923	32.52165
2012Q2	4.715891	1.10718	15.07238	31.58091
2012Q3	4.688078	1.231586	13.67529	30.69038
2012Q4	4.615297	1.422227	12.30102	29.85005
2013Q1	4.280828	1.78207	8.81857	25.91399
2013Q2	4.204797	2.063992	8.342367	26.43245
2013Q3	4.170484	2.370961	8.741398	28.25948
2013Q4	4.177891	2.702977	10.01566	31.39509
2014Q1	4.536195	3.223047	15.10516	40.06056
2014Q2	4.503367	3.539953	16.9539	44.12481
2014Q3	4.388586	3.816703	18.50187	47.80912
2014Q4	4.191852	4.053297	19.74907	51.1135
2015Q1	3.452188	4.213133	20.95531	51.72723
2015Q2	3.275938	4.384055	21.49706	55.19602
2015Q3	3.202125	4.529461	21.63413	59.20914
2015Q4	3.23075	4.649352	21.3665	63.76661
2016Q1	3.747398	4.21232	20.06302	77.98088
2016Q2	3.826664	4.493742	19.23848	79.98205
2016Q3	3.854133	4.962211	18.26173	78.88259
2016Q4	3.829805	5.617727	17.13277	74.68248
2017Q1	3.550711	8.006656	15.03267	56.48204
2017Q2	3.503977	8.417719	13.92683	50.44052
2017Q3	3.486633	8.397281	12.99633	45.65824
2017Q4	3.49868	7.945344	12.24117	42.1352
2018Q1	3.698203	5.33257	10.72472	43.66615
2018Q2	3.705797	4.709367	10.69491	41.14366
2018Q3	3.679547	4.346398	11.21509	38.36251
2018Q4	3.619453	4.243664	12.28528	35.32268
2019Q1	3.432898	5.294758	16.42523	26.69719
2019Q2	3.342164	5.355055	17.58752	25.27081
2019Q3	3.254633	5.318148	18.29189	25.71656
2019Q4	3.170305	5.184039	18.53836	28.03444
2020Q1	2.421641	4.607766	17.07571	42.06815
2020Q2	2.610734	4.417234	16.90685	44.19279
2020Q3	3.070047	4.267484	16.78057	44.25207
2020Q4	3.799578	4.158516	16.69687	42.24599
2021Q1	5.922883	4.254117	18.03711	30.24432
2021Q2	6.74343	4.161195	17.48602	27.27962
2021Q3	7.384773	4.043539	16.42495	25.42165
2021Q4	7.846914	3.901148	14.85392	24.67041
2022Q1	8.129852	3.734023	12.77292	25.02591
2022Q2	8.233586	3.542164	10.18195	26.48815
2022Q3	8.158117	3.32557	7.081016	29.05712
2022Q4	7.903445	3.084242	3.470109	32.73282

Sumber : Data Diolah (Excell,2023)

Analisis Korelasi Dilihat dari Keeratan Hubungan

Tabel 3
Hasil Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal

Correlation Probability	X1	X2	X3	Y
X1	1.000000 -----			
X2	-0.292339 0.0438	1.000000 -----		
X3	-0.401651 0.0047	0.040704 0.7836	1.000000 -----	
Y	-0.438254 0.0018	0.376980 0.0083	0.437063 0.0019	1.000000 -----

Sumber :Data Diolah (Lampiran), 2023

$$rx1,y = \frac{n(\sum x1,y) - (\sum x1)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x1^2) - (\sum x1)^2}(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$
$$rx2,y = \frac{n(\sum x2,y) - (\sum x2)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x2^2) - (\sum x2)^2}(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$
$$rx3,y = \frac{n(\sum x3,y) - (\sum x3)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x3^2) - (\sum x3)^2}(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$

- Nilai rx1,y sebesar -0.438254 menunjukkan bahwa hubungan x1 dengan y ketika variabel lainnya konstan, adalah memiliki hubungan sedang. Nilai correlation yang diperoleh bernilai negatif, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu tidak searah. Dengan nilai P-Value < 0,05 sebesar 0.0018 maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Modal.
- Nilai rx2,y sebesar 0.376980 menunjukkan bahwa hubungan x2 dengan y ketika variabel lainnya konstan, adalah memiliki hubungan rendah. Nilai correlation yang diperoleh bernilai positif, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu searah. Dengan nilai P-Value < 0,05 sebesar 0.0083 maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal.
- Nilai rx3,y sebesar 0.437063 menunjukkan bahwa hubungan x3 dengan y ketika variabel lainnya konstan, adalah memiliki hubungan sedang. Nilai correlation yang diperoleh bernilai positif, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel yaitu searah. Dengan nilai P-Value < 0,05 sebesar 0.0019 maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Belanja Modal.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis diatas, dapat dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan korelasi masing-masing variabel independent (bebas) terhadap variabel dependent (terikat), antara lain : Korelasi Dana Bagi Hasil (DBH)(X₁), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X₂), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)(X₃) terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Fakta atau kondisi lapangan yang terjadi, mengindikasikan jika pengalokasian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam anggaran Belanja Modal, seperti pembangunan fasilitas sarana publik (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau dinikmati masyarakat dalam jangka waktu pendek. Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Minahasa Tenggara yang kurang fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sepenuhnya leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja modal untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya, yang antara lain berupa, pembangunan sarana dan prasarana dasar (fisik ataupun non-fisik) yang sepatutnya ikut andil dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara yang optimal. Banyaknya dana yang tidak terserap secara optimal oleh kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan kurang optimalnya penggunaan anggaran daerah, dimana banyaknya dana silpa setiap tahunnya. Dana silpa ini, menunjukkan kelemahan Pemerintah Daerah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat sehingga dana yang besar tersebut tidak mampu direalisasikan dalam bentuk belanja modal secara optimal. Untuk itu pemerintah daerah seharusnya membuat “Master Plan” yang lebih matang untuk mengoptimalkan pengeluaran untuk sektor-sektor produktif dengan merancang program program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis penelitian ini yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara. Terdapat kesamaan penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dilakukan oleh Yani Rizal & Erpita (2019)²³ jurnal Samudra ekonomika Vol 3 No 1 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kota Langsa, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data *time series* tahun 2006-2017, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data *time series*, metode analisis regresi linier sederhana, uji t, dan analisis koefisien determinasi, hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa. Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja modal Kota Langsa sebesar 40,6%, sedangkan sisanya 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Ordinary Least Squares* pada penelitian mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),

²³ Yani Rizal & Erpita, 2019

terhadap Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bahwa:

1. Secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) ada korelasi yang signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada korelasi yang signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ada korelasi yang signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan hasil *metode ekonometrik* pada penelitian mengenai analisis korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan alokasi belanja modal maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dan pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa berkurang. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dengan cara membeli barang-barang belanja modal yang produktif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis korelasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Terhadap Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), untuk mendanai setiap kebutuhan daerah agar dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Perlu adanya sektor ekonomi baru yang dibuka atau memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki guna memaksimalkan pendapatan asli daerah.
3. Perlu adanya program kerja prioritas dari pemerintah daerah guna menangani permasalahan serta kebutuhan yang dimiliki oleh daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya sampel dan objek penelitian lebih diperluas lagi dan bisa juga membandingkan dengan objek lainnya serta menambahkan jangka waktu penelitian yang lebih panjang dan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal sehingga hipotesis yang ingin diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 1995. *Dictionary of accounting*, Jakarta : Mario Grafika
- Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik* penerbit BPFE, Yogyakarta
- Bratakusuma Deddy S, Solihin Dadang. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.
- Choms Gary Ganda Tua Sibarani, Jihen Ginting, Vivi Afriliani, Nasrullah Hidayat (2022) Vol 3 No 2. *Influence of Profit Sharing Funds and Regional Financial Performance in the Previous Year on the Allocation of Capital Expenditures in Provincial Governments in Indonesia in 2016 – 2020*.
- Darise Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi Kedua : penerbit PT. Indeks, Jakarta
- Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim, Imam Novayandi (2021) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal*

- Faisal Humiang, Hendrik Manossoh, Peter Kapojos (2022) Vol 5 No 2. Analisis Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Penerbit Andi: Yogyakarta *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Margono (2021). Analisis Pengaruh PAD, DBH,DAU,DAK, dan SILPA terhadap Belanja Modal.
- Marselina A. Pekambani, M.E. Perseveranda, Rere P. Bibiana (2023) Vol 7 No 2. *Effect of Local own source revenue, general allocation funds, special allocation funds, and profit-sharing funds on capital expenditure.*
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Sheila Ardhian Nuarisa (2013) Vol 2 No 1. Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Siregar Baldrice, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YPKP.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah Edisi pertama*, Yogyakarta, Andi.
- Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016) Vol 1 No 1. Pengaruh PAD, DAU, Dan DBH Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh).
- Tryas Chasbiandani, Rafrini Amyulianthy, Anisa May (2022) Vol 2 No 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani Rizal & Erpita (2019) jurnal Samudra ekonomika Vol 3 No 1 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kota Langsa.

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA

Depfrin Sinaga¹, Haifa Azalia Pinem², Nazwa Mutia³, Nasrullah Hidayat⁴, Muammar Rinaldi⁵

Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara

E-mail: haifaazalia01@gmail.com, depfrin230423@gmail.com, nazwamutia53@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana situasi perekonomian suatu negara berubah secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, karena berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah diukur dari derajat pertumbuhan ekonominya, maka setiap negara menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tujuan perencanaan dan pembangunan nasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2006 – 2021. Pengujian data ini menggunakan Eviews 10 dengan menggunakan regresi ECM (*Error Correction Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam jangka pendek, variabel jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam jangka panjang, variabel jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Di Sumatera Utara. 2) Dalam jangka pendek, variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam jangka panjang, variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. 3) Dalam jangka pendek, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam jangka panjang, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Pengangguran

ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of population, labor force and unemployment on the rate of economic growth in North Sumatra. Economic growth is the process by which the economic situation of a country changes continuously over a period of time. Because the success or failure of a region's development is measured by the degree of economic growth, every country targets high economic growth as the goal of its national planning and development. This study uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of North Sumatra Province 2006 - 2021. Testing this data using Eviews 10 using ECM (*Error Correction model*) regression. The results of this study show: 1) In the short term, the population variable has a positive and insignificant relationship with the economic growth rate in North Sumatra. In the long term, the total population variable has a negative and not significant relationship to the economic growth rate in North Sumatra. 2) In the short term the labor force variable has a positive and not significant effect on the rate of economic growth in North Sumatra. In the long term the labor Force variable has a positive and insignificant effect on the rate of economic growth in North Sumatra. 3) In the short term, unemployment has a negative and significant effect on the rate of economic growth in North Sumatra. In the long term, unemployment has a positive and significant effect on the rate of economic growth in North Sumatra.*

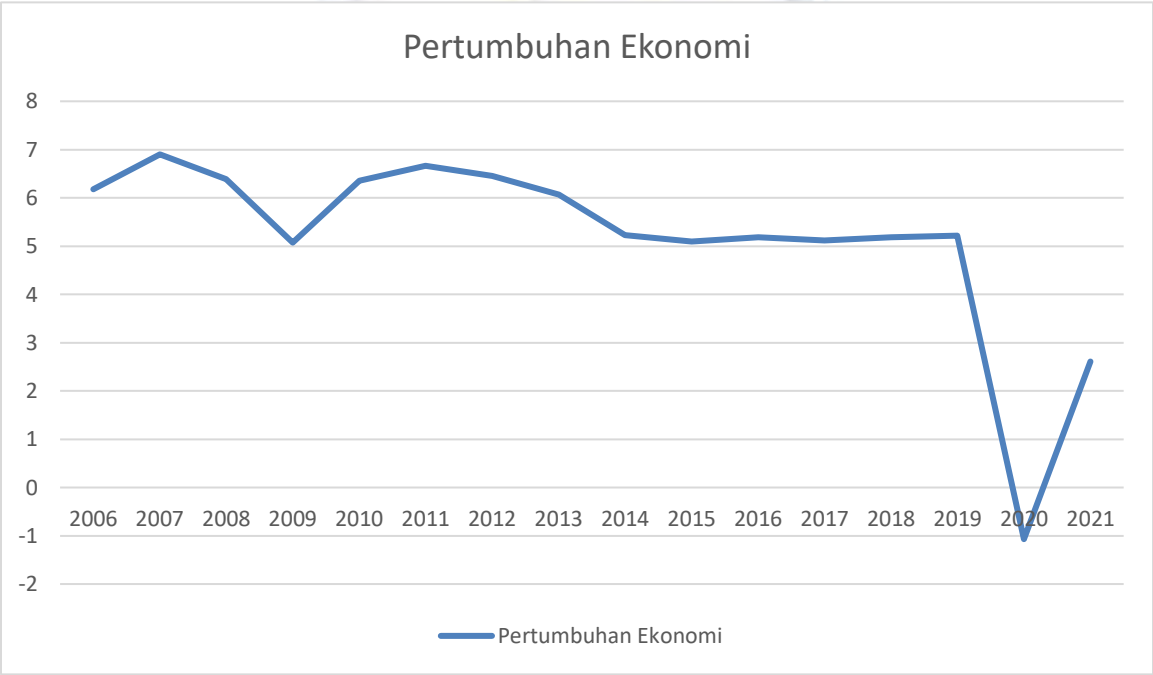
Keywords: Economic Growth, Population, Labor Force, Unemployment

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana situasi perekonomian suatu negara berubah secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah diukur dari derajat pertumbuhan ekonominya, sehingga setiap negara menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tujuan perencanaan dan pembangunan nasionalnya. Indikator

terpenting untuk menentukan situasi perekonomian negara adalah PDB atau tingkat kenaikan total produk dan total pendapatan selama periode waktu tertentu.

Menurut (Arsyad 2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan PDB, terlepas dari apakah peningkatan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur perekonomian. Teori pertumbuhan Kuznet menyatakan bahwa sebelum masa pertumbuhan, aktivitas ekonomi masyarakat terkonsentrasi pada sektor-sektor utama yang eksploitatif, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Proses pertumbuhan ekonomi sejak saat itu ditandai dengan adanya diversifikasi kegiatan sektoral dengan berkembangnya berbagai jenis dan industry.



Dapat dilihat pada tahun 2006 - 2010 laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dikarenakan didorong oleh beberapa faktor pengembangan sektor ekonomi di Sumatera Utara. Penyebab tingginya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 6,35% adalah menurunnya pengangguran. Selain itu, sektor pertanian, investasi, kualitas pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri seperti: mengurangi kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan perluasan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,07% pada tahun 2021 yang disebabkan karena Covid 19 yang menyerang Indonesia. Dampak yang terjadi adalah penurunan lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, menurunnya daya beli masyarakat serta rendahnya minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman kepada Bank sehingga perusahaan cenderung menggunakan dana operasionalnya untuk kebutuhan internal. Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara kian hari lebih baik sebesar 2,61% karena adanya kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan penduduk memperluas pasar dan menyebabkan tingginya spesialisasi dalam perekonomian. Jumlah penduduk suatu negara atau wilayah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan penduduk, kualitas pendidikan, kesempatan kerja, dan infrastruktur. Namun, jika jumlah penduduk meningkat pesat dan pembangunan infrastruktur serta lapangan kerja tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi, akan timbul berbagai permasalahan seperti pengangguran, kesenjangan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan pertumbuhan penduduk memerlukan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian (Handayani, Bendesa, and Yuliarni 2016) menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena

itu, jumlah penduduk merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi itu sendiri selalu berkaitan dengan jumlah penduduk.

Meningkatnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, maka total output dalam suatu daerah akan semakin besar dan output tersebut akan semakin tinggi sehingga jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pun semakin meningkat. Hal ini merupakan contoh ketersediaan peluang. Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi, terutama karena belum seimbangnya jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia serta belum terkendalinya tingkat pengangguran. Dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sari, Syechalad, and Majid 2016). Menurut (Arsyad 2004) ada beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi pengangguran. Pertama, adanya permintaan tenaga kerja, namun pasokan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pasar tenaga kerja. Kedua, adanya permasalahan upah yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tingkat pengangguran. Ketiga, inflasi mendorong dunia usaha melakukan perampangan dan beroperasi lebih efisien. Keempat, pertumbuhan ekonomi mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga penambahan lapangan kerja tidak dapat menyerap masuknya tenaga kerja baru. Jumlah lulusan baru lebih besar dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan, maka angkatan kerja semakin meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan (Yoga Krissawindaru Arta 2013) menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah.

Pengangguran merupakan masalah sosial yang umum terjadi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Menurut (Sukirno 2010) pengangguran adalah suatu keadaan menganggur di antara sekelompok pekerja yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya. Pengangguran berdasarkan usia mengacu pada penduduk berusia 15 hingga 65 tahun, termasuk penduduk aktif (Zurisdah 2016) Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah (Zulfa 2016). Dalam jangka panjang, tingginya tingkat pengangguran akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hartati 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangguran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena pengangguran mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang positif dan menjadi permasalahan. Kesempatan kerja pasti akan meningkatkan tren ini. Namun, distribusi yang tidak merata dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya pengangguran.

Kajian Teori

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, kemakmuran dan kemajuan ekonomi ditentukan oleh tingkat pertumbuhan, yang dinyatakan dalam perubahan output nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Menurut (Arsyad 2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk domestik bruto (PDB)/produk nasional bruto (GNP), tanpa memperhatikan apakah peningkatan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk atau perubahan perekonomian atau struktural telah muncul. Menurut (Hasyim 2016), pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses yang secara terus menerus mengubah keadaan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen:

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja.

2. Pertumbuhan penduduk pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja suatu negara.
3. Kemajuan teknologi atau cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi adalah berkembangnya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu prioritas pembangunan suatu negara dan salah satu tanda keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan produk domestik bruto, yang merupakan rangkuman kegiatan perekonomian suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah Penduduk

(Yenny and Anwar 2020) mendefinisikan populasi sebagai “sekelompok orang yang tinggal dan bertempat tinggal di suatu negara.” Apabila pertumbuhan penduduk diimbangi dengan tingginya tingkat pendapatan dan kapasitas produktif, maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin kaya populasi suatu negara, semakin kuat pertumbuhan ekonominya. Adam Smith dalam penelitian berteori bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan produksi dan output.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi produksi local dan jumlah penduduk yang besar menciptakan angkatan kerja yang besar pula. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pertumbuhan penduduk akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Todaro 2009) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan angkatan kerja berarti tingkat produksi yang lebih tinggi, dan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat berarti perluasan pasar domestik. Namun, masih ada pertanyaan apakah pertumbuhan penduduk yang cepat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, dampak positif atau negatif pertumbuhan penduduk bergantung pada kemampuan sistem ekonomi lokal untuk secara efektif menyerap dan memanfaatkan angkatan kerja yang terus bertambah. Menurut (Tjiptoherijanto 1996), angkatan kerja diartikan sebagai banyaknya penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan, tergantung pada kelompok yang bekerja dan kelompok yang mencari pekerjaan atau kelompok yang menganggur.

Menurut (Qomariyah 2013) pengangguran adalah ketidakmampuan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Dapat kita simpulkan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang sudah bekerja tidak dapat memperoleh pekerjaan dan berusaha mencarinya. Menurut Badan Pusat Statistik dilihat dari indikator ketenagakerjaan, penganggur adalah mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang mempunyai pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha baru atau orang yang diperbolehkan bekerja. Menurut (Murni 2006), seseorang dikatakan menganggur apabila ia tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. (Sukirno 2010) menggambarkan pengangguran sebagai suatu keadaan dimana seseorang dalam angkatan kerja menginginkan suatu pekerjaan tetapi tidak mampu memperolehnya. Adapun faktor – faktor penyebab pengangguran yaitu:

1. Lowongan kerja yang sesuai dengan pencari kerja masih sedikit dan jumlah pencari kerja tidak dapat menandingi peluang kerja yang ditawarkan di Indonesia.
2. Kurangnya keterampilan para pencari kerja dan banyaknya jumlah pekerja tidak terampil menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, ketika pencari kerja tidak memiliki akses terhadap informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja.

- 4. Ketimpangan kesempatan kerja, banyaknya lapangan kerja dan minimnya lapangan kerja di kota.
- 5. Upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill masih belum optimal. Budaya malas masih mempengaruhi para pencari kerja yang mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

Hipotesis:

- 1. Hipotesis jumlah penduduk terhadap laju pertumbuhan ekonomi
H₀₁: Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
H_{a1}: Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
- 2. Hipotesis angkatan kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi
H₀₂: Angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
H_{a2}: Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
- 3. Hipotesis pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi
H₀₃: Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
H_{a3}: Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
- 4. Hipotesis jumlah penduduk, angkatan kerja, pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
H₀₄: Secara simultan jumlah penduduk, angkatan kerja, pengangguran secara simultan tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
H_{a4}: Secara simultan jumlah penduduk, angkatan kerja, pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu data time-series. Variabel yang digunakan meliputi jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 15 tahun dari tahun 2006 hingga 2021. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan software EvIEWS 10. Metode yang digunakan penulis adalah Error Correction Model (ECM). Model regresi ECM yang digunakan adalah :

1. Persamaan Jangka Panjang

$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X1_t + \alpha_2 X2_t + \alpha_3 X3_t + \alpha_4 X4_t + ut$

dimana:

Y = Laju pertumbuhan ekonomi

X1 = Jumlah penduduk

X2 = Angkatan kerja

X3 = Pengangguran

ut = nilai residual

2. Persamaan Jangka Pendek

$\Delta Y = \beta_0 + \beta_1 \Delta X1_t + \beta_2 \Delta X2_t + \beta_3 \Delta X3_t + \beta_4 \Delta X4_t + \beta_5 ECT + ut$

dimana:

Y = Laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

X1 = Jumlah penduduk

X2 = Angkatan kerja

X3 = Pengangguran

ut = nilai residual

ECT = Error Correction Term

Uji Stasionaritas

Langkah pertama dalam pengolahan data dengan menggunakan metode analisis lag terdistribusi autoregresif adalah dengan melakukan uji stasioneritas data. Stasioneritas data penting ketika menguji data dalam bentuk deret waktu. Suatu variabel dikatakan stasioner jika mean, varians, dan kovariansnya tetap konstan pada setiap waktu dan pada setiap lag. Oleh karena itu, jika variabel-variabel dalam data runtun waktu tidak memenuhi syarat tersebut, maka data tersebut tidak stasioner (Gujarati, Damodar 2012).

Uji Kointegrasi (Cointegration Test)

Langkah selanjutnya adalah menjalankan pengujian kointegrasi data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keseimbangan antar variabel dari waktu ke waktu. Jika variabel-variabel yang diteliti digabungkan, hal ini menunjukkan adanya hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel tersebut. Uji kointegrasi dilakukan untuk memeriksa apakah residu regresi yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara variabel independen dan dependen yang diteliti. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi uji gabungan. F-statistik yang diperoleh dari pengujian ini dibandingkan dengan nilai uji marginal pada $I(0)$ dan $I(1)$. Jika F-statistik $I(1)$ terikat berarti H_0 ditolak, artinya data yang diselidiki mengandung kointegrasi (Widarjono 2009).

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah mengetahui ada tidaknya perbedaan varians residu antar variabel yang diamati atau diuji dalam suatu model regresi. Apabila varians dari sisa variabel yang diteliti ke variabel yang lain tetap konstan, berarti terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak akan mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas. Tes ini menggunakan tes Breusch-Pagan-Godfrey. Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar dari α 5% berarti diperoleh H_0 . Artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model observasi yang dilakukan, begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas chi-square < Nilai α 5% berarti penolakan H_0 . Artinya terdapat masalah heteroskedastisitas pada model observasi yang dijalankan (Widarjono 2009).

Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan mengetahui apakah suatu penelitian mempunyai masalah autokorelasi dengan menggunakan tes Breusch-Godfrey (BG). Uji ini merupakan uji autokorelasi yang dapat diterapkan pada regresi dengan lag dari variabel terikat sebagai variabel bebas dan direkomendasikan untuk observasi survei dalam jumlah yang relatif besar. Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar dari α 5% berarti diperoleh H_0 . Artinya jika nilai probabilitas Chi kuadrat < maka model observasi yang dilakukan tidak ada masalah autokorelasi, begitu pula sebaliknya, jika α 5% berarti penolakan terhadap H_0 , artinya model observasi yang dijalankan mempunyai masalah autokorelasi (Widarjono 2009).

Uji Normalitas

Uji normalitas memeriksa apakah variabel yang diuji berdistribusi normal, Uji Jarque-Bera (JB) digunakan sebagai metode uji normalitas. Nilai JB yang diharapkan mendekati 0. Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari α 5% yaitu menerima H_0 , maka data residual berdistribusi normal. Hal sebaliknya terjadi jika nilai probabilitas JB < α 5% berarti penolakan terhadap H_0 , Artinya data sisa penelitian tidak berdistribusi normal (Widarjono 2009).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen terhadap data penelitian yang dilakukan. Metode pengujian ini menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat ditentukan adanya masalah multikolinearitas, sehingga nilai VIF yang diharapkan kurang dari 10 (Widarjono, 2018: 108).

Uji Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)

Model autoregressive distribution lag (ARDL) merupakan gabungan dari model AR (autoregressive) dan DL (distributed lag). ARDL merupakan model yang dapat digunakan untuk menyelesaikan model data deret waktu pada berbagai tingkat stasioneritas. Prosedur pengujian data dengan menggunakan model ARDL dimulai dengan uji stasioneritas data, uji kointegrasi, dan dilanjutkan dengan estimasi model ARDL (Widarjono 2009)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu hasil yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui besarnya kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ganda ini diperoleh dari nilai Adjusted R-squared, dan nilai atau hasil ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Jika nilai koefisien (R^2) mendekati 1 maka besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono 2009).

Uji F-Statistik

Uji F-statistik dapat menunjukkan apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Langkah pertama dalam uji F adalah menentukan hipotesis, dan langkah kedua adalah menentukan tingkat signifikansi dan kriteria pengujian yang nantinya digunakan untuk menarik kesimpulan. Kriteria yang ditetapkan dengan uji F adalah: Jika taraf signifikansi 5% maka nilai signifikansi $F < \alpha$ 5% sebesar 0,05 yang berarti variabel independen dalam penelitian secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t-Statistik

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lain mempunyai karakteristik konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai $\alpha = 5\%$. Jika nilai probabilitas $> \alpha$ 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha$. Jika α sebesar 5% maka variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis hasil estimasi model ECM dalam jangka panjang dan jangka pendek sebelumnya telah dilakukan pengujian data. Data yang digunakan dalam penelitian perlu menggunakan 2 uji akar – akar unit dan uji kointegrasi. Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh variabel dalam model penelitian pada Augmented Dickey Fuller (ADF) Test yang perhitungannya menggunakan Eviews 10.

Tabel 1.
Hasil Uji Akar – Akar Unit dengan Augmented Dickey Fuller test pada Level.

Intermediate ADF test results UNTITLED

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
PE	0.2927	0	2	15
JP	0.9412	0	2	15
AK	0.7537	0	2	15
PENGANGGURAN	0.1404	0	2	15

Berdasarkan Tabel 1, diketahui semua variabel Y, X₁, X₂ dan X₃ tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai probabilitas berturut – turut adalah 0,2927; 0,9412; 0,7537; 0,1404. Oleh karena itu, untuk keperluan regresi ECM maka perlu dilakukan proses differensi terhadap data tersebut agar data stasioner pada derajat yang sama. Dengan prosedur yang sama seperti langkah

diatas maka, hasil uji akar – akar unit Augmented Dickey Fuller (ADF) test pada derajat first Difference sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji Akar – Akar Unit dengan Augmented Dickey Fuller Test pada First Diffrence

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(PE)	0.0005	0	2	14
D(JP)	0.0190	0	2	14
D(AK)	0.0048	0	2	14
D(PENGANGGUR AN)	0.0110	0	2	14

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Akar – Akar Unit Augmented Dickey Fuller (ADF) test pada derajat First Difference menunjukkan bahwa semua data telah stasioner pada derajat yang sama yaitu first difference. Setelah Uji Stationer melalui Uji Akar – Akar Unit dan derajat integrasi pada first difference mengetahui parameter jangka panjang. Pengujian kointegrasi menggunakan Uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak.

Tabel 3. Hasil Uji Akar – Akar Unit terhadap Residual dengan ADF test

Null Hypothesis: ECT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.493397	0.0037
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

Berdasarkan Tabel 3, uji ADF tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat level residual memiliki nilai probabilitas yaitu 0,0037 dimana lebih kecil dari tingkat $\alpha=5\%$ sehingga dapat dinyatakan telah stasioner. Hal ini dapat diartikan telah terjadi kointegrasi diantara semua variabel. Hasil model ECM dalam jangka panjang diestimasi menggunakan regresi OLS dengan EvIEWS. Hasil ini ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Estimasi Model ECM dalam Jangka Panjang

Dependent Variable: PE
Method: Least Squares
Date: 11/23/23 Time: 21:39
Sample: 2006 2021
Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.08541	8.470624	4.850340	0.0004
JP	-2.20E-06	1.20E-06	-1.832844	0.0917
AK	-1.60E-07	1.64E-06	-0.097142	0.9242
PENGANGGURAN	-1.10E-05	4.25E-06	-2.595300	0.0234
R-squared	0.700498	Mean dependent var		5.165000
Adjusted R-squared	0.625623	S.D. dependent var		1.950672
S.E. of regression	1.193545	Akaike info criterion		3.404051
Sum squared resid	17.09460	Schwarz criterion		3.597198
Log likelihood	-23.23241	Hannan-Quinn criter.		3.413942
F-statistic	9.355513	Durbin-Watson stat		2.417417
Prob(F-statistic)	0.001824			

Berdasarkan Tabel 4 merupakan hasil estimasi OLS dengan menggunakan Model ECM dalam Jangka Panjang. Hasil regresi tersebut untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan variabel independen adalah Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran. Variabel X_1 yaitu: jumlah penduduk dengan nilai probabilitas sebesar 0,0917 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ sehingga jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, variabel X_2 Angkatan kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9242 dimana lebih besar dari $\alpha = 5\%$ sehingga Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, variabel X_3 yaitu: pengangguran dengan nilai probabilitas 0,0234 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ sehingga Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut layak digunakan atau tidak. Suatu model dapat diartikan layak ketika nilai Probabilitas F hitungnya lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Berdasarkan model tersebut memiliki Probabilitas F hitung sebesar 0,001824 dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ sehingga model ini telah layak digunakan.

Uji R^2 merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terikat. Berdasarkan hasil regresi jangka panjang didapatkan nilai sebesar 0,700498. Dari nilai tersebut mengartikan bahwa secara bersama – sama variabel independen yaitu: Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran berpengaruh sebesar 70,04% terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi, sisanya sebesar 29,96% adalah variabel lain yang tidak terdapat didalam model tersebut.

Tabel 5. Hasil Estimasi Model ECM dalam Jangka Pendek

Dependent Variable: D(PE)
Method: Least Squares
Date: 11/23/23 Time: 22:06
Sample (adjusted): 2007 2021
Included observations: 15 after adjustments

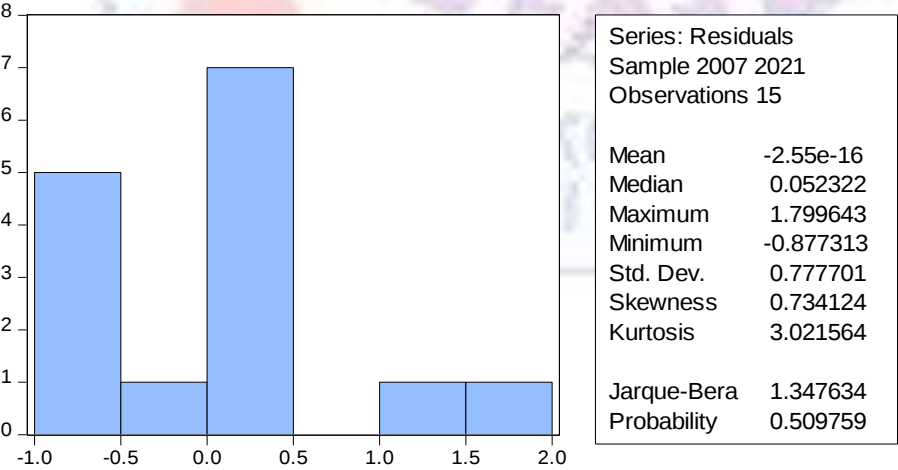
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.777087	0.435260	-1.785340	0.1045
D(JP)	1.42E-07	2.30E-06	0.061501	0.9522
D(AK)	1.23E-06	1.28E-06	0.959498	0.3599
D(PENGANGGURAN)	-2.82E-05	5.86E-06	-4.807115	0.0007
ECT(-1)	-1.017061	0.240018	-4.237437	0.0017

R-squared	0.852582	Mean dependent var	-0.238000
Adjusted R-squared	0.793615	S.D. dependent var	2.025524
S.E. of regression	0.920188	Akaike info criterion	2.932724
Sum squared resid	8.467458	Schwarz criterion	3.168741
Log likelihood	-16.99543	Hannan-Quinn criter.	2.930210
F-statistic	14.45858	Durbin-Watson stat	2.187335
Prob(F-statistic)	0.000366		

Pada hasil estimasi yang didapatkan bahwa ECT (-1) signifikan dengan nilai 0,0017 dan berkoefisien negatif yaitu -1,017061. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil estimasi ECM dalam jangka pendek dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi sedangkan Pengangguran berpengaruh dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil ECM dalam Jangka Pendek diperoleh nilai R² sebesar 0,8525 atau 85,25% sehingga dalam penelitian ini menandakan bahwa secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan sisanya yaitu 14,75% adalah variabel lain yang tidak terdapat didalam model tersebut. Selanjutnya pada nilai Probabilitas F hitung yaitu sebesar 0,000366 dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5 \%$ sehingga dapat dinyatakan bahwa ECM ini layak digunakan.

Uji Asumsi Klasik (Jangka Pendek)



Berdasarkan histogram normality test menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jarque Bera adalah 0,509759. Hasil ini menunjukkan model ECM telah lolos uji normalitas dengan probabilitas sebesar 0.509759 lebih besar dari $\alpha=5\%$.

Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: D(PE) C D(JP) D(AK) D(PENGANGGURAN) ECT(-1)
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.776559	9	0.4573
F-statistic	0.603043	(1, 9)	0.4573
Likelihood ratio	0.972832	1	0.3240

Berdasarkan hasil Ramsey Reser Test menunjukkan nilai 0,4573 dimana nilai ini lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa model ECM telah lolos dalam uji linearitas.

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.189451	3.356105	NA
D(JP)	5.31E-12	4.877135	2.029745
D(AK)	1.64E-12	2.507508	1.981256
D(PENGANGGURAN)	3.44E-11	1.551823	1.485164
ECT(-1)	0.057609	1.119601	1.116706

Dikatakan bebas uji multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 sedangkan nilai VIF pada variabel X_1, X_2, X_3 bernilai lebih kecil dari 10. Sehingga model ECM dapat dikatakan lolos uji multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.475771	Prob. F(2,8)	0.6379
Obs*R-squared	1.594487	Prob. Chi-Square(2)	0.4506

Berdasarkan hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa Nilai Prob Chi-Square adalah 0,4506. Nilai ini lebih besar dari $\alpha=5\%$ sehingga hal ini berarti model ECM telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

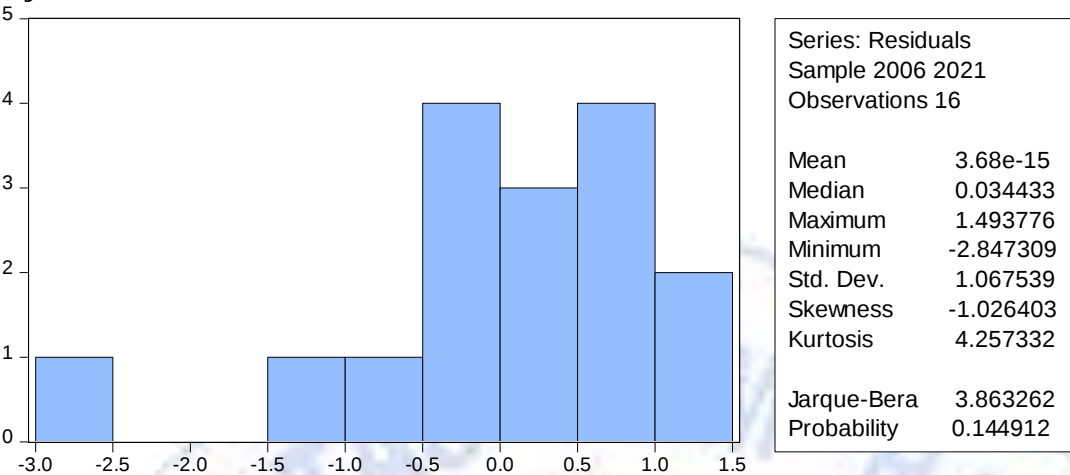
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.764150	Prob. F(4,10)	0.5720
Obs*R-squared	3.511558	Prob. Chi-Square(4)	0.4761
Scaled explained SS	1.577519	Prob. Chi-Square(4)	0.8128

Berdasarkan Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey menunjukan hasil Chi-Square sebesar nilai 0,4761. Nilai ini lebih besar dari $\alpha=5\%$ sehingga hal ini berarti model ECM telah terbebas dari masalah Heteroskedastisitas.

Uji Asumsi Klasik (Jangka Panjang)

Uji Normalitas



Berdasarkan histogram normality test menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jarque Bera adalah 0,144912. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan model ECM telah lolos uji normalitas dengan probabilitas sebesar 0,509759 lebih besar dari $\alpha=5\%$.

Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED

Specification: PE C JP AK PENGANGGURAN
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	2.343190	11	0.0390
F-statistic	5.490538	(1, 11)	0.0390
Likelihood ratio	6.478264	1	0.0109

Berdasarkan hasil Ramsey Reser Test menunjukkan nilai 0.0390 dimana nilai ini lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa model ECM tidak lolos dalam uji linearitas.

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	71.75148	805.8849	NA
JP	1.44E-12	2988.634	9.705347
AK	2.70E-12	1284.017	9.124316
PENGANGGURAN	1.81E-11	43.58649	1.294081

Dikatakan bebas uji multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 sedangkan nilai VIF pada variabel X_1 , X_2 , X_3 bernilai lebih kecil dari 10. Sehingga model ECM dapat dikatakan lolos uji multikolinearitas

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.525437	Prob. F(2,10)	0.6068
Obs*R-squared	1.521507	Prob. Chi-Square(2)	0.4673

Berdasarkan hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa nilai prob Chi-Square adalah 0,4673. Nilai ini lebih besar dari $\alpha=5\%$ sehingga hal ini berarti model ECM telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas			
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	2.578018	Prob. F(3,12)	0.1023
Obs*R-squared	6.270626	Prob. Chi-Square(3)	0.0992
Scaled explained SS	5.744675	Prob. Chi-Square(3)	0.1247

Berdasarkan Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey menunjukan hasil Chi-Square sebesar nilai 0,0992. Nilai ini lebih besar dari $\alpha=5\%$ sehingga hal ini berarti model ECM telah terbebas dari masalah Heteroskedastisitas.

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara.

Dalam jangka pendek, variabel jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yenny and Anwar 2020) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe dikarenakan jumlah penduduk yang besar namun tidak diiringi dengan kontribusi yang produktif pada kotanya maka hal ini berpengaruh secara positif nmaun tidak signifikan terhadap kota Lhokseumawe tersebut.

Sedangkan dalam jangka Panjang, variabel Jumlah Penduduk memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, Bendesa, and Yuliarni 2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan jumlah penduduk dapat memperkecil PDRB perkapita. Hal ini berarti penambahan jumlah penduduk di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan peningkatan PDRb di Provinsi Bali. Namun pada kenyataanya apabila bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitas maka penduduk tersebut menjadi sebuah beban dalam proses pembangunan, sehingga hal inilah yang mendorong upaya peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

2. Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara.

Di dalam jangka pendek, variabel Angkatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Di Sumatera Utara. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yoga Krissawindaru Arta 2013) menyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan di Jawa Tengah dikarenakan pemerintah daerah Jawa Tengah mengharapkan memperluas lapangan kesempatan kerja yang nantinya output juga ikut meningkat.

Sedangkan dalam jangka Panjang, variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alisman 2016) menyatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan di Aceh.

3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Di dalam jangka pendek, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arif Novriansyah 2018) tentang pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Selatan dengan hasil bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan.

Sedangkan dalam jangka Panjang, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartati 2020) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan

signifikan di Provinsi Aceh, karena ketika pengangguran naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan turun 1.175742, tingkat pengangguran merupakan sebuah keadaan seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan guna memperoleh pendapatan sehingga jika pengangguran meningkat maka akan menambah beban negara yang akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam jangka pendek, variabel jumlah penduduk dan angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan dalam jangka panjang variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, selanjutnya, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Saran

Diharapkan pemerintah dapat menekan angka pengangguran dikarenakan pengangguran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah juga harus meningkatkan lapangan pekerjaan dan pelatihan yang dapat menambah skill dan pengetahuan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. 2016. "Pengaruh Investasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh." *Jurnal E-KOMBIS* 2 (1): 79–91.
- Arif Novriansyah, Mohamad. 2018. "Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo." *Gorontalo Development Review* 1 (1): 59. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Gujarati, Damodar, N. 2012. *Dasar - Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Novi Sri, I K.G Bendesa, and Ni Nyoman Yuliarni. 2016. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah Dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5 (10): 3449–74.
- Hartati, Nani. 2020. "Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010 – 2016." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5 (01): 92–119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>.
- Hasyim, Linda Tamim Umairah. 2016. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8 (1): 11. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27>.
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Qomariyah, Isti. 2013. "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1 (3): 1–8.
- Sari, Mutia, Mohd. Nur Syechalad, and Sabri. Abd Majid. 2016. "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 3 (November): 109–15.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1996. "Kesiapan Pekerja Dalam Peningkatan Kualitas Hasil Industri/Jasa Menghadapi Pasar Persaingan Bebas." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia* 44: 229–49.
- Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. 11th ed. Jakarta: Erlangga.

- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Yenny, Nanda Fitri, and Khairil Anwar. 2020. "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9 (2): 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181>.
- Yoga Krissawindaru Arta. 2013. "Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah." *Economic Development Analysis Journal* 2 (2): 1–8.
- Zulfa, Andria. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Visioner & Strategis* 5 (1): 13–22.
- Zurisdah, Zahra. 2016. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten." *Skripsi*, 1–82.



PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Estelita M. Tungka¹, Mauna Th. B Maramis², George M.V. Kawung³

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi*

E-mail: 1esterlitatungka1999@gmail.com, 2maunabeatrix@unsrat.ac.id, 3georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda pada data tahunan yang diperoleh dari periode 2005-2022, temuan penelitian menawarkan perspektif yang mendalam mengenai dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meskipun ada peningkatan pada IPM, pengangguran, atau pertumbuhan ekonomi, belum tentu akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, potensi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut akan menurun. Secara keseluruhan, ketika dilihat bersama-sama, semua variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meski IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak signifikan secara individu, namun pengeluaran pemerintah memegang peran kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memberikan dampak optimal dalam penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Sulawesi Utara.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Human Development Index (HDI), unemployment, economic growth, and government expenditure on the poverty rate in North Sulawesi Province. Using multiple linear regression analysis on annual data obtained from the period 2005-2022, the research findings offer an in-depth perspective on the dynamics of poverty in the region. Based on the analysis, it was found that HDI, unemployment, and economic growth have a positive but insignificant influence on the poverty rate. This means that even if there is an increase in HDI, unemployment, or economic growth, it will not necessarily have a significant impact in reducing poverty in North Sulawesi. Meanwhile, government expenditure has a negative and significant effect, indicating that the greater the government expenditure, the potential poverty rate in the province will decrease. Overall, when viewed together, all variables have a significant effect on poverty.

The conclusion of this study confirms that although HDI, unemployment, and economic growth do not have a significant impact individually, government spending plays a key role in poverty reduction efforts in North Sulawesi. Therefore, the allocation and use of the government budget needs special attention to have an optimal impact on poverty reduction.

Keywords: *Human Development Index, Unemployment, Economic Growth, Government Expenditure, Poverty, North Sulawesi.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi semua bangsa di dunia. Kemiskinan pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya

sumber daya manusia yang dimiliki dan yang dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun non formal (Supriatna, 2000).

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tak pernah lepas dari masalah kemiskinan. Kenaikan angka kemiskinan di Sulawesi Utara disebabkan oleh banyak faktor. Kemiskinan di Sulawesi Utara dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap masalah ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pengangguran hanyalah satu dari banyak aspek yang mempengaruhi kemiskinan, dan faktor-faktor lain seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah juga memiliki peran.

Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam mengentaskan kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Akan tetapi terlihat bahwa kemiskinan di perdesaan terkesan lebih sulit ditangani oleh pemerintah dibanding di perkotaan. Salah satu faktor penyebabnya kemungkinan disebabkan oleh karena pendidikan penduduk di perdesaan yang masih tertinggal sehingga usaha pemerintah untuk membangun sumber daya manusia untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan agak terkendala dan pilihan membangun sarana dan fasilitas akan memakan biaya yang cukup besar.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2022

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)
2005	201,4	9,79
2006	249,4	9,8
2007	250,1	9,81
2008	218,2	11,42
2009	210,1	9,8
2010	218,2	9,32
2011	194,7	9,59
2012	177,4	8,46
2013	201,1	7,63
2014	197,56	8,5
2015	208,54	8,26
2016	202,82	8,65
2017	198,88	8,34
2018	193,31	8,1
2019	191,7	7,8
2020	192,37	7,66
2021	196,35	7,62
2022	185,14	7,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2023

IPM dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Upaya pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dapat memiliki dampak positif terhadap mengurangi tingkat kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020 bulan Februari tercatat sebesar 05,01 persen. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sendiri diartikan sebagai

persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sulawesi Utara mungkin menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk penduduknya. Kurangnya peluang pekerjaan formal dan ketergantungan pada sektor pertanian atau sektor informal dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan negara yang mengalami kenaikan secara nasional agregatif ataupun peningkatan output dalam suatu periode tertentu. Makna lainnya dari pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dalam barang dan jasa dengan fisik sesuai pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang industri, jumlah sekolah, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sektor jasa, serta bertambahnya produksi barang modal. Setiap negara akan berupaya untuk menaikkan dan memberikan hal yang terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan optimal.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya menaikkan pertumbuhan ekonominya guna kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang lebih baik. Kondisi di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak yang menjadi pengangguran.

Pengeluaran pemerintah dapat meningkat karena berbagai alasan yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Beberapa alasan umum mengapa pengeluaran pemerintah bisa meningkat antara lain yaitu peningkatan kebutuhan publik. Jumlah penduduk yang bertambah dan perubahan dalam struktur demografi dapat meningkatkan permintaan akan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Ini dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan ini.

Berdasarkan pembahasan diatas, kendala dan kebijakan untuk mengatasi pengentasaan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih dimiliki oleh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Pengentasaan kemiskinan sendiri masih menjadi suatu hal yang sangat kompleks dan menjadi proyek nasional yang harus dijalankan oleh setiap daerah. Oleh karena itu, untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan sekaligus mengurangi masalah kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu, saya mengambil judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”.

Rumusan Masalah

1. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara?
5. Apakah faktor indeks pembangunan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah indeks pembangunan manusia, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai studi indeks pembangunan manusia (IPM), pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.
2. Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah untuk keefektifan kebijakan yang telah digunakan guna mengatasi kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Riyadi dan Deddy (2005), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Bintoro (2005), unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut : 1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. 2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya. 3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. 4. Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Sedangkan menurut Bachtiar Chamsyah (2006) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. Menurut Mahbub ul Haq ahli pembangunan asal Pakistan yang menciptakan konsep IPM berpendapat bahwa pembangunan seharusnya berpusat pada manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. IPM mencakup tiga dimensi utama: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Teori Pengangguran

John Maynard Keynes menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat kurangnya permintaan efektif di ekonomi. Ketika permintaan untuk barang dan jasa menurun, perusahaan mengurangi produksi dan memecat pekerja. Milton Friedman berpendapat tentang adanya 'pengangguran alamiah' yang terjadi akibat interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut Sukirno (2008: 13), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

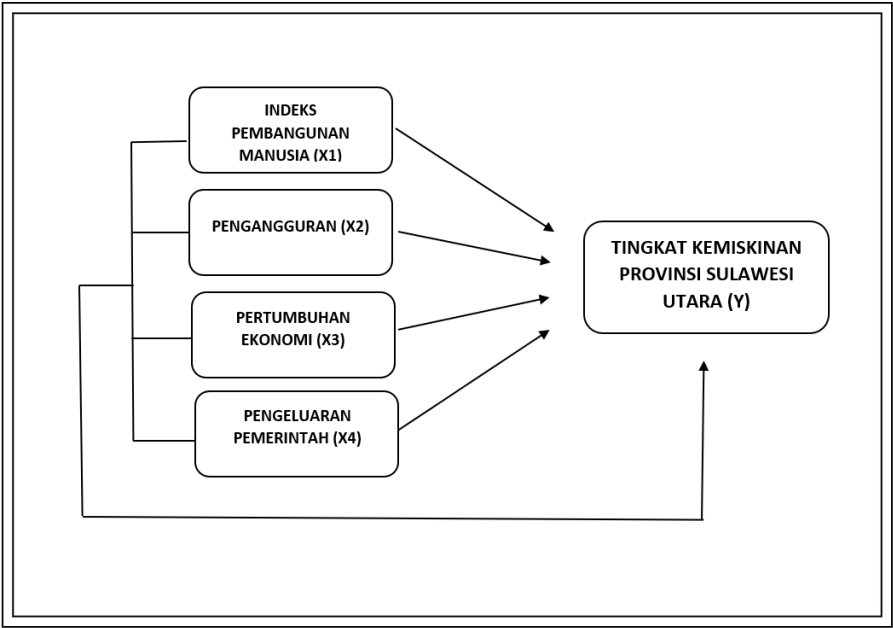
Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012: 57). Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011: 423)

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut David Ricardo: Teori "Efek Pengusiran" (crowding out) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi investasi swasta. Menurut John Maynard Keynes dalam teorinya, ia berpendapat bahwa dalam kondisi resesi, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Hipotesa penelitian

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka Tingkat kemiskinan rendah, dan sebaliknya.
2. Diduga Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika pengangguran naik maka tingkat kemiskinan akan naik, dan sebaliknya.

3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat kemiskinan akan turun, dan sebaliknya.
4. Diduga Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Artinya jika pengeluaran pemerintah naik maka tingkat kemiskinan akan turun, dan sebaliknya.
5. Diduga IPM, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data Kuantitatif berupa data yang sudah diolah dan dipublikasi oleh instansi dan organisasi yang terkait. Data kuantitatif dapat diartikan sebagai data penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data kuantitatif bersifat dapat diukur dalam suatu skala numerik (Sugiono, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series dan cross-section tahun 2005-2022 yang bersumber dari instansi yang memiliki kaitan dengan masalah dan variabel dalam penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara..

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi utara. Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran terbuka.

a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan manusia suatu negara atau wilayah. IPM dirancang oleh PNUD (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1990 sebagai alternatif terhadap ukuran ekonomi tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, dengan fokus pada dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Data IPM Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan tahun 2005-2022.

b. Pengangguran (X2)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022.

c. Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan output atau pertambahan pendapatan daerah agregatif dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sektor produksi atas dasar harga konstan. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

persentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022 (dalam satuan persen).

d. **Pengeluaran Pemerintah (X4)**

Pengeluaran pemerintah adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara atau entitas pemerintah pada berbagai program, layanan, proyek, dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi belanja pemerintah menurut pengeluaran provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2022.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi dan uji t. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n)$$

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4$$

Keterangan :

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variable Independen

X1 = Indeks Pembangunan Manusia

X2 = Pengangguran

X3 = Pertumbuhan ekonomi

X4 = Pengeluaran pemerintah

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2011: 97).

Uji Parsial (uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan regresi berganda adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sejumlah variabel bebas (independen) dengan satu atau lebih variabel terikat (dependen) dalam sebuah model regresi berganda. Tujuan dari uji simultan ini adalah untuk memeriksa apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikat. Uji simultan ini berguna dalam mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi secara keseluruhan adalah signifikan.

Uji Asumsi

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik *normal probability Plot*. Pada pendekatan ini nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.

2. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Dengan kata lain multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. (Gujarati, 2005 : 157). Melalui pendekatan olahan data dengan Eviews maka gejala multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai VIF pada tabel Coefficients dimana jika nilai VIF lebih rendah dari 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas. Selain itu gejala multikolinearitas dapat dilihat melalui Coefficient Correlations Matrix. Jika korelasi antara sesama variabel bebas lebih rendah dari 0,5 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas. (Santosa & Ashari, 2005 : 238 -240).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diuji menggunakan Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Dasar pengambilan keputusan uji ini berdasarkan nilai p-value. Jika uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi > 0.05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi < 0.05 maka model regresi masih terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda dan interpretasinya sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/15/23 Time: 22:46
Sample: 2005 2022
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.572954	4.757325	0.751043	0.4660
X1	0.063722	0.084813	0.751324	0.4658
X2	1.39E-05	1.43E-05	0.968811	0.3503
X3	0.038500	0.085800	0.448720	0.6610
X4	-4.56E-10	2.32E-10	-1.967549	0.0708
R-squared	0.798553	Mean dependent var		8.656111
Adjusted R-squared	0.736569	S.D. dependent var		1.086273
S.E. of regression	0.557536	Akaike info criterion		1.899553
Sum squared resid	4.040999	Schwarz criterion		2.146878
Log likelihood	-12.09598	Hannan-Quinn criter.		1.933656
F-statistic	12.88325	Durbin-Watson stat		2.284464
Prob(F-statistic)	0.000186			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023

Berdasarkan hasil output diatas diperoleh persamaan :

$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_3.X_4 + e$

$Y = 3,572954 + 0,063722 + 0,0000139 + 0.038500 - 0,000000000456 + e$

Dengan : Y = Persentase Kemiskinan

X1= IPM

X2= Jumlah Pengangguran

X3=Pertumbuhan Ekonomi

X4=Realisasi Belanja Pemerintah

Berdasarkan persamaan regresi diatas, analisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen, yaitu :

- Hasil persamaan dari Tabel dapat diterjemahkan konstanta tingkat kemiskinan sebesar 3.572954 yang mengandung arti bahwa jika variabel IPM (X1), pengangguran (X2), pertumbuhan ekonomi(X3), dan pengeluaran pemerintah sama dengan 0, maka tingkat kemiskinan adalah sebesar 3.572954.
- Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara IPM terhadap tingkat kemiskinan. Artinya IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien IPM (X1) yaitu sebesar 0.063722 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel IPM (X1) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0.063722, dan sebaliknya.
- Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien pengangguran (X2) yaitu sebesar 1.39E-05 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel pengangguran (X2) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan naik sebesar 1.39E-05, dan sebaliknya.
- Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (X3) yaitu sebesar 0.038500 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel

pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0.038500, dan sebaliknya.

5. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan. Artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah (X4) yaitu sebesar -4.56E-10 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar - 4.56E-10, dan sebaliknya.

Hasil Uji t (Parsial)

- a. t hitung variabel IPM (X1)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,4658>0,10 dan nilai t hitung 0,751<t tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- b. t hitung variabel Pengangguran (X2)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,3503>0,10 dan nilai t hitung 0,9688<t tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- c. t hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,6610>0,10 dan nilai t hitung 0,448<t tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- d. t hitung variabel Pengeluaran Pemerintah (X4)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,0708>0,10 dan nilai t hitung 1,967549>t tabel 1,3502 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Hasil Uji f (Simultan)

Hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan nilai sig 0,000186 > 0,10 maka H0 ditolak sehingga dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² atau koefisien determinasi untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji R² adalah sebagai berikut:

Tabel 3	
Koefisien Determinasi (R ²)	
R-Squared	Adjusted R-Squared
0,798553	0,736569

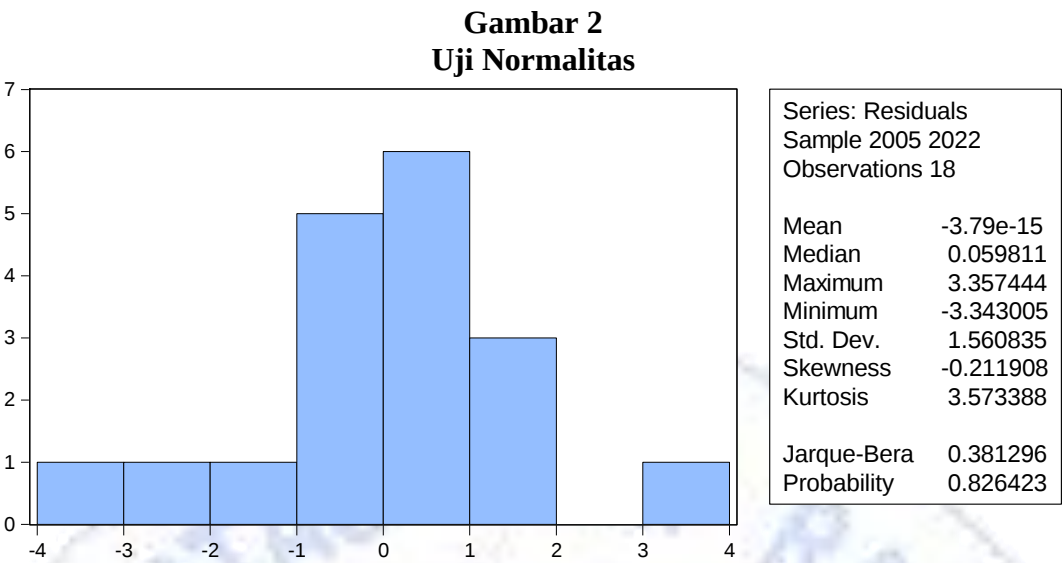
Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023

Hasil uji R² atau koefisien determinasi yaitu nilai Adjusted R Square sebesar 0,736569 menunjukkan bahwa kontribusi IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 74% (0,74 x 100%). Sisanya sebesar 26% (100% – 74%) dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependent, variable independent, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal.



Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,826 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas penelitian bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independent.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/16/23 Time: 01:17
Sample: 2005 2022
Included observations: 18

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	22.63214	1310.547	NA
X1	0.007193	2165.544	2.370416
X2	2.05E-10	114.4150	5.839796
X3	0.007362	17.31110	1.964758
X4	5.38E-20	22.67795	5.663377

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023.

Dapat dilihat pada table diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari angka 10. Ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Dasar pengambilan keputusan uji ini berdasarkan nilai p-value. Jika uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi > 0.05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan signifikansi < 0.05 maka model regresi masih terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.922792	Prob. F(2,10)	0.4288
Obs*R-squared	2.648661	Prob. Chi-Square(2)	0.2660

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023.

Dapat dilihat pada table diatas, nilai probability Obs*R-squared memiliki nilai sebesar 0,2660 (>0,05) maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob nya < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.562398	Prob. F(4,13)	0.2425
Obs*R-squared	5.843898	Prob. Chi-Square(4)	0.2111
Scaled explained SS	5.660826	Prob. Chi-Square(4)	0.2260

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews, 2023.

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser, probability Obs*R-squared > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel IPM adalah 0,0637. Hal ini dapat diartikan bahwa jika IPM naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 6,4% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sayifullah & Tia Ratu Gandasari yang berjudul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten" juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusdi yang berjudul "Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan" mendapatkan hasil IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya IPM di provinsi Sulawesi Utara tidak menjamin bahwa tingkat kemiskinan akan berkurang.

IPM memperhitungkan tiga dimensi utama, yaitu: kesehatan (harapan hidup saat lahir), pendidikan (lamanya waktu yang diharapkan untuk sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan

standar hidup (Pendapatan Nasional Bruto per kapita, PPP). Sebagai indikator pembangunan, IPM yang tinggi umumnya mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik dan akses pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan. Namun, strategi dan kebijakan yang tepat perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Pengangguran adalah 1,39. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pengangguran naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 139% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Meinny Kolibu yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara” juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Reksi Angga Irawan yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara” memiliki hasil pola hubungan antara variabel tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan adalah linear-linear. Dengan demikian hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu sosial ekonomi yang saling berkaitan.

Provinsi Sulawesi Utara, seperti halnya di berbagai wilayah lainnya di dunia, kenaikan tingkat pengangguran dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Pengangguran juga menyebabkan Kehilangan Pendapatan. Tanpa pendapatan tetap, banyak keluarga akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang dapat mendorong mereka ke dalam kemiskinan. Dengan meningkatnya pengangguran, daya beli masyarakat berkurang. Hal ini berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan kehilangan keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan yang berkelanjutan.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,0385. Hal ini dapat diartikan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 3,8% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Feliks Arfid Guampe, Abdi Sakti Walenta, Fredrik Bastian Kawani dengan judul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021” juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Pangkiro, 2016) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum dapat menyelesaikan peningkatan kemiskinan yang terjadi. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam output atau produk domestik bruto (PDB) suatu negara, hal tersebut tidak selalu berarti akan ada penurunan tingkat kemiskinan.

Beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi bisa disertai dengan peningkatan kemiskinan antara lain adalah ketidaksetaraan pendapatan. Jika manfaat pertumbuhan ekonomi

hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sementara sebagian besar lainnya tidak merasakan manfaat tersebut, maka ketidaksetaraan pendapatan akan meningkat. Ini dapat menyebabkan tingkat kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat. Struktur perekonomian juga salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi. Beberapa sektor mungkin tumbuh dengan cepat, sementara sektor lain mungkin stagnan atau bahkan menyusut. Jika sektor yang tumbuh cepat tidak menciptakan banyak lapangan kerja atau sektor-sektor dengan pekerjaan berupah rendah mengalami kontraksi, hal ini bisa meningkatkan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi merata dan inklusif, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah adalah -4.56. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Narka Suda Pratama dan Made Suyana Utama yang berjudul “Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali” juga mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini tergantung pada bagaimana, di mana, dan kepada siapa pengeluaran tersebut dialokasikan. Salah satu cara pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas dasar lainnya, dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar, pekerjaan, dan sumber daya lainnya, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di Sulawesi Utara harus terus diarahkan dan dikelola dengan baik karena memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat provinsi Sulawesi Utara.

5. Pengaruh secara Bersama-sama

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama. Ini berarti bahwa, berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, ada hubungan yang kuat antara semua variabel independent terhadap tingkat kemiskinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi melalui badan-badannya agar dapat lebih memperhatikan sector yang menyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM agar dapat mengurangi pengangguran.
2. Pemerintah harus mengkaji kembali dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pertumbuhan yang inklusif. Hal ini berarti manfaat pertumbuhan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara**, *Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara tahun 2005-2022*.
- Bintoro, Tjokromidjojo** (2003), *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chamsyah Bachtiar** (2006), *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, RM-Books, Jakarta.
- Feliks Arfid Guampe** (2022), *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2021*.
- Ghozali, Imam** (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta.
- Jhingan, M. L** (2012), *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolibu, Meinny** (2017), *Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*.
- Narka Suda Pratama, I Made Suyana Utama** (2019), *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali*.
- Pangkiro, Henny** (2016), *Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara*.
- Reksi Angga Irawan** (2022), *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara*.
- Riyadi dan Deddy** (2005) *Perencanaan pembangunan Daerah*, PT.
- Sayifullah, Gandasari T.R** (2016), *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*.
- Sugiyono** (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono** (2011), *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sumedi dan Supardi** (2004), "Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi" *Icaserd Working Paper No.21, PUsat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian, Agustus 2011, Bogor*.
- Tjahja Supriatna** (2000), *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA TAHUN 2004 - 2019

Aisyah Amelia¹, Diky Siregar², Noel Tamba³, Zaskya Humairah⁴, Joko Suhariant⁵

Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan,
Sumatera Utara

E-mail: aisyahamilia33@gmail.com, dikysyamhenri@gmail.com, noeltamba17@gmail.com,
zaskiyahhumairah@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik Provinsi Sumatera Utara dalam periode tahun 2004-2019, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat human capital dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan uji ECM dan uji regresi berganda. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah melalui aplikasi evIEWS. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari pada tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas perlu dikaji pengaruh pengangguran dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, human capital, pengangguran.

ABSTRACT

The economic growth of a country or region that continues to show improvement illustrates that the economy of that country or region is developing well in North Sumatra Province in the 2004-2019 period. The aim of this research is to look at human capital and unemployment on economic growth in North Sumatra. The research method used in this journal uses the ECM test and multiple regression test. Data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and processed through the evIEWS application. Unemployment can occur as a result of the high rate of change in the labor force which is not balanced by the existence of fairly large employment opportunities and labor absorption which tends to be a small percentage. Therefore, based on the description above, it is necessary to study the influence of unemployment and labor on economic growth in the Province. North Sumatra.

Keywords: economic growth, human capital, unemployment

1. PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara melalui pembangunan menjadi suatu keharusan yang tak dapat diabaikan. Masyarakat, sebagai aset dasar, menjadi fokus utama dalam proses pembangunan yang melibatkan transformasi ekonomi dan sosial untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Sasaran pokok dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan penduduk menikmati kehidupan yang sehat, umur panjang, dan tingkat produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya konkret dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah salah satu metode untuk menilai keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan. Hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai pembangunan manusia yang optimal. Meningkatkan pembangunan manusia tidak hanya mendukung

peningkatan produktivitas, tetapi juga memperkuat usaha-usaha produktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan..

Peningkatan angka pengangguran dapat diinterpretasikan sebagai tanda buruknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Nanga (2005:249), pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi negara berkembang, tetapi juga bagi negara maju dan individu yang termasuk dalam angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan, namun secara aktif mencari peluang pekerjaan. Dalam konteks ini, definisi tersebut mengindikasikan bahwa seseorang yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan dapat dianggap sebagai pengangguran.

Pengangguran mengacu pada situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja berkeinginan untuk bekerja namun belum berhasil mendapat pekerjaan (Sukirno, 2004). Angkatan kerja sendiri merujuk pada jumlah tenaga kerja yang ada dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Penghitungan tingkat pengangguran melibatkan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah pengangguran dalam suatu negara pada tahun tertentu. Menurut Asfia Murni (2006:197), pengangguran sering dikaitkan dengan individu yang berusia 15 hingga 65 tahun. Namun, tidak semua orang dalam rentang usia tersebut dianggap sebagai angkatan kerja karena ada yang mungkin tidak bersedia untuk bekerja (Nanga, 2001:253).

Definisi lain mengenai pengangguran, seperti yang diungkapkan oleh Nanga (2001:253), adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Sukirno (2001:14) juga menyatakan bahwa pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang masuk dalam angkatan kerja berkeinginan untuk bekerja tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan.

Kajian Teori

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses peningkatan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil suatu negara. Secara sederhana, perkembangan ekonomi terjadi ketika output riil mengalami peningkatan. Menurut definisi Suryana (2000:5), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan Gross Domestic Product (GDP), tanpa memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pertumbuhan penduduk, dan tanpa memperhatikan perubahan dalam struktur perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan suatu proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Simon Kuznetz, seperti yang dikutip dalam Todaro (2004:35), juga mengungkapkan pandangan serupa, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya.

Ragam teori pertumbuhan ekonomi mencakup:

1. Teori Pertumbuhan Klasik: Teori Ekonomi Klasik menyatakan bahwa unsur utama dalam sistem produksi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia (jumlah dan kualitas penduduk), dan stok modal (Budiono, 1982).
2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik: Menurut Teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010).
3. Teori Pertumbuhan Endogen: Tujuan teori pertumbuhan adalah menjelaskan peningkatan standar hidup secara berkelanjutan. Teori pertumbuhan endogen menekankan faktor-faktor internal dalam perekonomian, seperti inovasi, penelitian dan pengembangan, dan modal manusia, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi secara alami.

Definisi Human Capital

Human capital adalah kumpulan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja, dianggap sebagai sumber daya atau aset yang memiliki nilai. Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, seperti yang diuraikan oleh Barro dan Martin (1999), pertumbuhan suatu wilayah dapat terjadi tanpa bergantung pada variabel eksogen dari luar wilayah. Kemajuan teknologi di wilayah tersebut dapat dicapai melalui peningkatan dan perbaikan kualitas human capital, yaitu kapasitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pengertian Human Capital sebagai kata benda merujuk pada keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu atau penduduk, dan dianggap sebagai nilai individu atau biaya yang dikeluarkan untuk organisasi atau negara. Bellante (1983) menjelaskan bahwa human capital adalah investasi yang dilakukan oleh individu dalam bentuk dana atau pengeluaran guna meningkatkan kapasitas produktif atau earning power mereka.

Konsep Human Capital

Konsep modal manusia, yang diperkenalkan oleh Schultz (1960) dan Becker (1964) dalam pandangan modern, dapat dijelaskan sebagai kapasitas atau kemampuan individu yang dimiliki sejak lahir atau diwariskan, serta terakumulasi selama usia produktif melalui investasi dalam pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Dalam perspektif ini, modal manusia melibatkan upaya investasi pada aspek-aspek tersebut dengan tujuan mencapai kemakmuran ekonomi.

Definisi lain menyebutkan bahwa konsep modal manusia pada dasarnya mencakup pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja (Yan dkk., 2003). Becker menyoroti bahwa bentuk modal manusia juga melibatkan pendidikan formal, pelatihan komputer, perawatan kesehatan, dan perilaku jujur. Dengan melakukan investasi pada aspek-aspek ini, seseorang dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan menjamin kehidupan yang lebih baik.

Para ekonom sepakat bahwa biaya pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan investasi krusial untuk pengembangan modal manusia. Konsep modal manusia dianggap signifikan karena manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai seperti pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan, yang tidak dapat diukur secara moneter dan aset fisik (The Concise Encyclopedia of Economics, 2002).

Hubungan Human Capital dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara human capital dan pertumbuhan ekonomi sangat erat. Human capital memiliki potensi untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendukung perkembangan perekonomian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu. Setiap individu memiliki tingkat keahlian dan pengetahuan yang berbeda, dan investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kedua aspek tersebut. Pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya, mencerminkan peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator pertumbuhan ekonomi sering diukur menggunakan persentase Pertumbuhan Domestik Bruto (GDP) riil suatu negara.

Pengaruh human capital terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bersifat langsung. Tingkat investasi dalam pendidikan oleh suatu negara dapat menjadi indikator sejauh mana human capital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, banyak pemerintah yang memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada warganegaranya tanpa biaya. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan pengetahuan membawa keuntungan, dan melalui pendidikan, mereka dapat mendukung pengembangan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, human capital diukur menggunakan dua variabel, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan hidup (AHH).

Teori Pengangguran

Pengangguran adalah situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak aktif mencari pekerjaan tidak dianggap sebagai penganggur. Keadaan pengangguran bisa terjadi karena ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, yang menandakan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi kebutuhan yang ada.

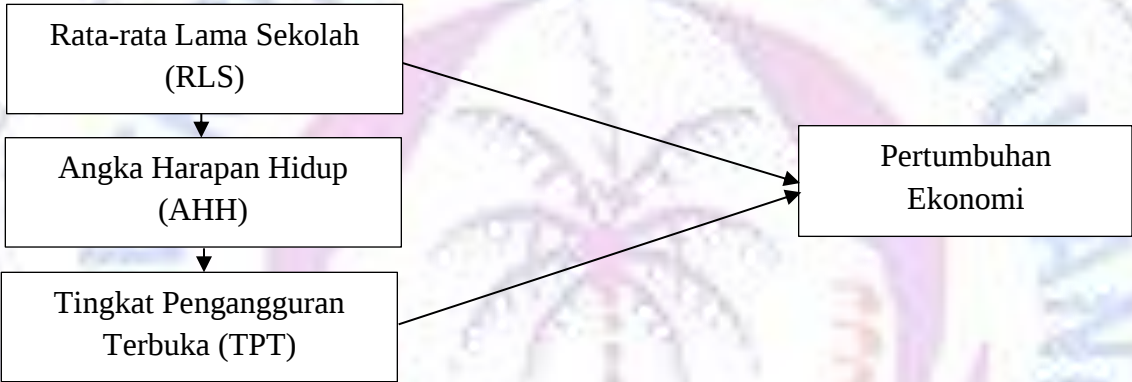
Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau tengah mempersiapkan usaha baru. Pengangguran juga mencakup penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori terkait dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai penting dalam suatu penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi pemahaman yang mendasari konsep-konsep lainnya, merupakan dasar yang fundamental bagi setiap pemikiran atau proses dalam keseluruhan penelitian (Sugiyono, 2011).

Dalam konteks ini, fokus penelitian ditujukan untuk menganalisis pengaruh variabel rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator untuk melihat proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah secara berkelanjutan menuju keadaan yang dianggap lebih baik selama periode tertentu.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencerminkan persentase individu yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, jika persentase pengangguran rendah, hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Hipotesis

Berdasarkan konteks dan tujuan penelitian di atas, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut::

- Diduga rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
- Diduga angka harapan hidup (AHH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
- Diduga tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

2. METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan melibatkan uji Error Correction Model (ECM) dan uji regresi berganda. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan aplikasi Eviews. Model regresi yang digunakan adalah metode pendekatan Error Correction Model (ECM) untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Sumatera Utara. Pendekatan ECM ini didasarkan pada hasil uji stasioneritas data, yang menunjukkan stasioneritas pada tingkat diferensiasi yang sesuai, dengan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF). Selain itu, penelitian ini juga menerapkan uji kointegrasi untuk menilai hubungan antara variabel dalam model. Pendekatan ini dipilih karena model regresi time series yang tidak stasioner dapat menghasilkan hasil regresi yang tidak akurat (Granger & Newbold, 1974). Pemilihan metode ini didasarkan pada hipotesis bahwa setiap data time series memiliki akar unit (Levin et al., 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Akar-akar Unit

Pengujian stasioneritas data dilakukan pada semua variabel yang digunakan dalam model penelitian ini menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. Analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan komputer dan dibantu oleh program analisis dari perangkat lunak Eviews 10.

Null Hypothesis: IPM has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-1.637897	0.4402
Test critical values:	1% level	-3.959148	
	5% level	-3.081002	
	10% level	-2.681330	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IPM)
Method: Least Squares
Date: 10/03/23 Time: 22:18
Sample (adjusted): 2005 2019
Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM(-1)	-0.347602	0.212224	-1.637897	0.1254
C	2450.379	1495.361	1.638654	0.1252

R-squared 0.171062 Mean dependent var 2.266667
Adjusted R-squared 0.107297 S.D. dependent var 186.6094
S.E. of regression 176.3141 Akaike info criterion 13.30598
Sum squared resid 404126.5 Schwarz criterion 13.40038
Log likelihood -97.79483 Hannan-Quinn criter. 13.30497
F-statistic 2.682708 Durbin-Watson stat 1.771933
Prob(F-statistic) 0.125408

Tabel 1. Hasil Uji Akar-akar Unit Dengan Augmented Dickey-Fuller Pada Tahap Level

ADF Statistik	Nilai Kritis 1%	Nilai Kritis 5%	Nilai Kritis 10%	Prob	Keterangan
IPM -1.637897	-3.959148	-3.081002	-2.673459	0.4402	Tidak Stasioner
PENGANGGURAN -3.187802	-3.959148	-3.081002	2.681330	0.0413	Stasioner
PDRBHB 1.692132	-4.057910	-3.119910	-2.681330	0.9987	Tidak Stasioner

Dari hasil yang tertera pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa hanya satu variabel dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang menunjukkan sifat stasioner pada tingkatnya. Oleh karena itu, dilakukan proses diferensiasi pada data variabel-variabel tersebut dengan derajat yang sama.

Tabel 2.
Hasil Uji Akar-akar Unit Dengan Augmented Dickey-Fuller Pada Tahap First Difference

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
Series: PDRBHB, IPM, PENGANGGURAN
Date: 10/03/23 Time: 22:22
Sample: 2004 2019
Exogenous variables: Individual effects
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0
Total (balanced) observations: 42
Cross-sections included: 3

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	32.4129	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-4.48363	0.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(PDRBHB)	0.0019	0	2	14
D(IPM)	0.0203	0	2	14
D(PENGANGGURAN)	0.0024	0	2	14

kesimpulan dari hasil uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat diferensiasi pertama, sebagaimana terdokumentasi dalam Tabel 2, adalah bahwa semua data variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan sifat stasioner pada tingkat diferensiasi kedua. Hal ini dapat disimpulkan dari nilai probabilitas yang kurang dari 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Akar-akar Unit Terhadap Residual Dengan ADF Test

Null Hypothesis: RES has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.376001	0.0294
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ECT)
Method: Least Squares
Date: 10/03/23 Time: 22:39
Sample (adjusted): 2005 2019
Included observations: 15 after adjustments

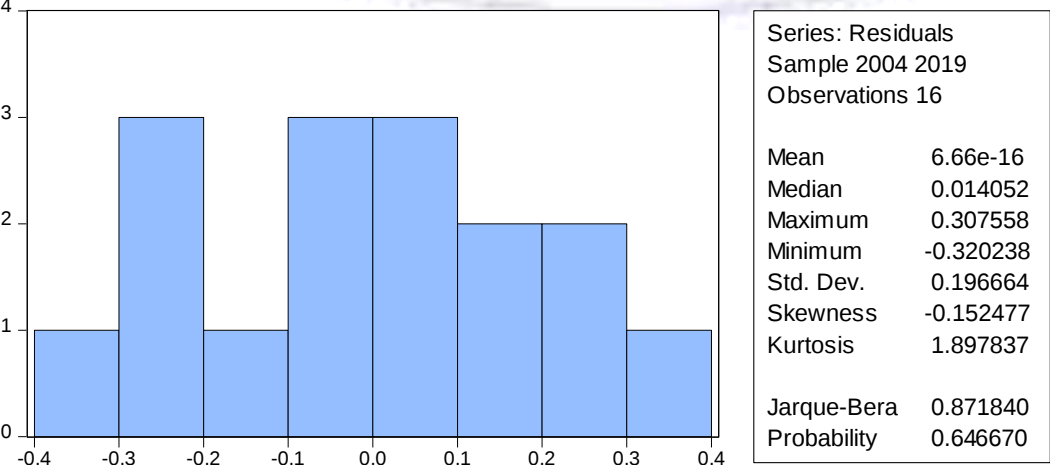
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-0.887815	0.262978	-3.376001	0.0050
C	-0.016370	0.050689	-0.322955	0.7519

R-squared	0.467156	Mean dependent var	-0.007418
Adjusted R-squared	0.426168	S.D. dependent var	0.258802
S.E. of regression	0.196047	Akaike info criterion	-0.297358
Sum squared resid	0.499648	Schwarz criterion	-0.202951
Log likelihood	4.230184	Hannan-Quinn criter.	-0.298363
F-statistic	11.39738	Durbin-Watson stat	1.730592
Prob(F-statistic)	0.004966		

Berdasarkan hasil uji ADF tersebut, dapat disimpulkan bahwa residual dalam persamaan jangka panjang menunjukkan sifat stasioner pada tingkat level, yang terlihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari 0,05. Artinya, residual tidak memiliki akar unit, dan hal ini memenuhi persyaratan untuk menggunakan model Error Correction Model (ECM). Oleh karena itu, dapat disetujui bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik
Normality Test

Tabel 4. Hasil Normality Test



Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi apakah terdapat masalah normalitas pada data, dapat diperhatikan pada tabel hasil uji di atas. Nilai probabilitasnya adalah 0,646670, yang lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menyiratkan bahwa data terdistribusi secara normal dan tidak ada tanda-tanda masalah normalitas pada model yang digunakan.

Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.455037	Prob. F(2,13)	0.6442
Obs*R-squared	1.046808	Prob. Chi-Square(2)	0.5925
Scaled explained SS	0.666614	Prob. Chi-Square(2)	0.7166

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini, seperti terlihat pada tabel uji menggunakan Glejser, nilai probabilitas Chi-Square adalah 0,5925, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.244343	Prob. F(2,11)	0.7874
Obs*R-squared	0.680580	Prob. Chi-Square(2)	0.7116

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, didapatkan angka probabilitas sebesar 0.7116, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 10/03/23 Time: 22:54
Sample: 2004 2019
Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(IPM)	4.453550	125356.5	1.426896
LOG(PENGANGGURAN)	0.079966	1086.771	1.426896
C	317.0803	113681.5	NA

Dalam pemeriksaan multikolinearitas, dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa VIF centered tetap berada di bawah 10. Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penggunaan dan estimasi data, yang mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi signifikan antar variabel.

Estimasi Model ECM (Jangka Pendek)

Tabel 8. Hasil Estimasi Model ECM (Jangka Pendek)

Dependent Variable: DLOG(PDRBHB)
Method: Least Squares
Date: 10/03/23 Time: 22:41
Sample (adjusted): 2005 2019
Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116292	0.040384	2.879648	0.0150
DLOG(IPM)	3.201607	1.426218	2.244823	0.0463
DLOG(PENGANGGURAN)	-0.230553	0.572578	-0.402658	0.6949
RES	0.018143	0.262243	0.069183	0.9461
R-squared	0.349124	Mean dependent var		0.127506
Adjusted R-squared	0.171612	S.D. dependent var		0.140575
S.E. of regression	0.127945	Akaike info criterion		-1.051251
Sum squared resid	0.180070	Schwarz criterion		-0.862437
Log likelihood	11.88438	Hannan-Quinn criter.		-1.053262
F-statistic	1.966767	Durbin-Watson stat		2.090371
Prob(F-statistic)	0.177515			

Dari hasil uji pada tabel di atas, didapatkan nilai R-squared sebesar 0.349124 atau 34,91%, mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan sekitar 34,91% variasi variabel dependen pada model jangka pendek. Meskipun demikian, sekitar 65,09% pengaruh faktor lain atau variabel lain terhadap PDRBHB di Sumatera Utara pada jangka pendek tidak tercakup dalam model penelitian ini. Variabel Ipm memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRBHB di Sumatera Utara dalam jangka pendek. Koefisien Ipm sebesar 3.201607 menunjukkan bahwa jika Ipm mengalami perubahan sebesar 1%, maka PDRBHB akan berubah sebesar 3.201607%. Sementara itu, variabel Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRBHB di Sumatera Utara dalam jangka pendek, dengan koefisien Pengangguran sebesar 0.230553. Artinya, jika Pengangguran mengalami perubahan sebesar 1%, PDRBHB akan berubah sebesar 0.230553%. Nilai F-statistik sebesar 1.966767 dengan probabilitas (F-statistic) sebesar 0.177515 menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen pada jangka pendek dalam model ini, yaitu Ipm dan Pengangguran, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara.

Estimasi Regresi (Jangka Panjang)

Tabel 9. Hasil Uji Estimasi Regresi (Jangka Panjang)

Dependent Variable: LOG(PDRBHB)
Method: Least Squares
Date: 10/03/23 Time: 22:38
Sample: 2004 2019
Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.41130	17.80675	-0.753158	0.4648
LOG(IPM)	4.982432	2.110344	2.360958	0.0345
LOG(PENGANGGURAN)	-2.923231	0.282782	-10.33740	0.0000
R-squared	0.903944	Mean dependent var		12.74946
Adjusted R-squared	0.889166	S.D. dependent var		0.634547
S.E. of regression	0.211252	Akaike info criterion		-0.104174
Sum squared resid	0.580154	Schwarz criterion		0.040686
Log likelihood	3.833391	Hannan-Quinn criter.		-0.096756
F-statistic	61.16891	Durbin-Watson stat		1.617719
Prob(F-statistic)	0.000000			

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ipm dan Pengangguran, sementara variabel dependen adalah PDRBHB di Sumatera Utara. Nilai R-squared sebesar 0.903944 mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan 90,36% variasi variabel dependen. Dengan kata lain, sekitar 80,68% dari variasi Penduduk Miskin dapat dijelaskan oleh variabel bebas, seperti Ipm, Angkatan Kerja, dan Pendidikan, sementara 9,64% sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai F-statistik sebesar 61.16891 dengan probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000000 menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen dalam jangka panjang, yaitu Ipm dan Pengangguran, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa secara bersama-sama, variabel independen pada jangka pendek dalam model ini, yaitu Ipm dan Pengangguran, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara selama periode tahun 2004-2019. Namun, untuk variabel independen pada jangka panjang dalam model ini, Ipm dan Pengangguran, memiliki pengaruh bersama-sama yang signifikan terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara selama rentang waktu yang sama.

Saran

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi serupa dengan penambahan variabel-variabel yang relevan dengan kesempatan dan menggunakan metode penelitian yang berbeda guna mengembangkan cakupan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Čadil, Jan. et al. 2014. Human Capital, *Economic Structure and Growth*. *Procedia Economics and Finance*, 12. Pp. 85-92
- Alghofari, Farid, 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980- 2007. Undip.
- Boediono. (1982). *Pengantar Ilmu Ekonomi nomor 2, Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPPE.
- C, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Airlangga.
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dana Percetakan STIM YKPN.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro, Refika Aditama, Edisi Kelima*. Bandung.
- Nanga, M. (2001). *Makro Ekonomi, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi : Teori Masalah Dan Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Granger, CWJ, & Newbold, P. (1974). Regresi palsu dalam ekonometrika. *Jurnal Ekonometrika*, 2(2), 111–120. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(74\)90034-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7)
- Levin, A., Lin, C.-F., & James Chu, C.-S. (2002). Uji akar unit dalam data panel: sifat asimptotik dan sampel terbatas. *Jurnal Ekonometrika*, 108(1), 1–24. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(01\)00098-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7)
- Barro, Robert J dan Xavier Sala I Martin, 1999. *Economic Growth*, MIT Press.
- Sadono, Sukirno. (2004). *Makroekonomi, Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2001. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bima Grafika.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Schultz, T. W. (1960). *Capital Formation by Education*. *Journal of Political Economy*, 69, 571-583.
- Becker, G. 1964. *Human Capital*. New York, Columbia: University Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

ANALISIS PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), TENAGA KERJA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Jelita Mashanafi¹, Tri Oldy Rotinsulu², Agnes L.Ch. P. Lapien³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: 1mashanafi_jelita@yahoo.co.id,
2oldyrotinsulu43257@gmail.com, 3agneslapian@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selama kurun waktu 2003 – 2022. Penelitian ini menggunakan data kurun waktu tahun 2003 - 2022 dan menggunakan analisis regresi linier berganda “*Ordinary Least Square*” (OLS) dengan bantuan perangkat lunak *eviews 8*. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, tenaga kerja memberikan pengaruh negatif dan signifikan yang berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja tanpa diimbangi dengan kecukupan lapangan kerja akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara karena pertumbuhan PMDN berfluktuasi disebabkan oleh faktor tata kelola infrastruktur dan komunikasi antara pengusaha/investor dan pemerintah yang masih kurang baik dan perlu dibenahi kembali.

Kesimpulan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), tenaga kerja (TK), pengeluaran pemerintah daerah (PPD) berpengaruh yang signifikan secara Bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Peran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel PMA, PMDN dan penyerapan angkatan kerja berdasarkan jumlah tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : *Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Sulawesi Utara.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of foreign investment, domestic investment, labor, government spending on economic growth in Sulawesi province during the period 2003 - 2022. This research uses data for the period 2003 - 2022 and using multiple linear regression analysis "Ordinary Least Square" (OLS) with the help of *eviews 8* software. Based on the results of the analysis, it was found that foreign investment and government spending had a positive and significant effect on economic growth. This means that increasing foreign investment and government spending can spur increased economic growth in North Sulawesi Province. Meanwhile, labor has a negative and significant influence, which means that increasing the number of workers without being balanced by sufficient employment opportunities will cause a decline in economic growth in North Sulawesi Province. Meanwhile, domestic investment has a positive and insignificant effect on economic growth in North Sulawesi Province because PMDN growth fluctuates due to infrastructure management factors and communication between entrepreneurs /investors and the government which is still not good and needs to be improved again.

The conclusion of the research results, it can be seen that foreign investment (PMA), domestic investment (PMDN, labor (TK), regional government expenditure (PPD) have a significant effect together on economic growth in North Sulawesi Province. The role of the government North Sulawesi Province, through government expenditure which can stimulate an increase in the PMA, PMDN variables and labor force absorption based on the number of workers, is expected to be able to increase regional economic activity in order to achieve economic growth in North Sulawesi Province.

Keywords: *Foreign Investment, Domestic Investment, Labor, Government Expenditure, Economic Growth, North Sulawesi.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, ini merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Terjadinya pertumbuhan ekonomi diakibatkan sebagai proses dimana terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil.

Perekonomian sering dikatakan tumbuh jika terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Sukirno (2011), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara 2012 – 2021 (dalam persen)

TAHUN	PERTUMBUHAN (PERSEN)	TAHUN	PERTUMBUHAN (PERSEN)
2003	3,19	2013	6,38
2004	4,26	2014	6,31
2005	5,35	2015	6,12
2006	5,72	2016	6,17
2007	6,47	2017	6,32
2008	10,86	2018	6,01
2009	7,85	2019	5,66
2010	7,16	2020	0,99
2011	6,17	2021	4,16
2012	6,86	2022	5,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2022

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 , dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2003 - 2022 Provinsi Sulawesi Utara lebih cenderung mengalami penurunan. Hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan diakibatkan oleh dampak Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara menjadi -0,99 persen. Namun demikian setelah pandemic covid 19 perekonomian di provinsi Sulawesi utara terlihat membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,42 %. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (rata – rata 5,1%).

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara masih mengalami penurunan dan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2022 berdasarkan lapangan usaha tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara mayoritas penurunan pada tahun 2020 diakibatkan oleh dampak covid-19. Pada tahun 2019 saat terdampak covid – 19 laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) yang mengalami kenaikan signifikan positif terjadi pada sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi, jasa kesehatan serta kegiatan sosial. Kedua sektor lapangan usaha ini sangat berperan penting pada saat covid – 19 dalam situasi covid – 19 upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cukup maksimal dalam sektor tersebut sampai tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Utara Kembali membaik setelah dampa covid – 19.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Utara (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,50	5,82	2,22	1,90	6,35
Pertambangan dan Penggalian	8,85	8,05	-1,35	5,15	0,26
Industri Pengolahan	4,39	0,59	4,47	8,63	7,19
Pengadaan Listrik dan Gas	3,51	9,19	6,94	6,96	10,17
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,29	4,42	4,18	0,49	1,34
Konstruksi	7,12	6,10	-4,52	7,11	3,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	8,72	-1,62	3,44	7,54
Transportasi dan Pergudangan	7,86	5,93	-13,87	1,49	11,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	2,80	-25,81	13,02	12,41
Informasi dan Komunikasi	7,80	7,98	10,67	2,47	4,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	3,75	5,91	5,27	-3,24
Real Estat	7,59	4,79	-1,28	-0,02	2,09
Jasa Perusahaan	9,04	7,25	-5,30	3,25	3,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,51	0,01	-1,42	2,46	1,77
Jasa Pendidikan	9,08	9,93	3,11	1,19	5,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,49	7,29	8,28	7,34	5,13
R,S,T,U Jasa Lainnya	11,84	13,80	-9,33	2,91	5,37
Produk Domestik Bruto	6,00	5,65	-0,99	4,16	5,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2022

Peningkatan investasi diyakini berperan dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA

Tahun	PMA				
	Jumlah Proyek	Realisasi (US \$)	Kurs Tengah (US \$) BI	Dalam Rupiah	Presentase
2018	139	295,847.8	14,481	4,284,171,991.8	31.47%
2019	243	220,473.6	13,901	3,064,803,513.6	22.52%
2020	291	155,689.5	14,105	2,196,000,397.5	16.13%
2021	118	169,079.7	14,269	2,412,598,239.3	17.72%
2022	151	105,130.8	15,731	1,653,812,614.8	12.15%
TOTAL	942.0	946,221.4	72,487.0	13,611,386,757.0	100%
RATA - RATA	188.4	189,244.3	14,497.4	2,722,277,351.4	20.0%

Sumber : NSWI BKPM, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai penanaman modal asing (PMA) selama kurun waktu tahun 2018 – 2022 rata – rata jumlah proyek 188,4 dengan nilai realisasi \$189.244,3 atau dirupiahkan menjadi 2.722.277.351 diolah oleh Provinsi Sulawesi Utara .

Tabel 1.4 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN

Tahun	PMDN		
	Jumlah Proyek	Realisasi (Juta Rupiah)	Presentase
2018	82	4,320,130.7	17.92%
2019	225	8,259,595.9	34.26%
2020	813	3,005,639.6	12.47%
2021	792	3,480,026.7	14.44%
2022	1,290	5,042,095.9	20.92%
TOTAL	10,387	24,107,489	100.00%
RATA -RATA	1,222.0	8,035,829.6	20.0%

Sumber : NSWI BKPM, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama kurun waktu 2018 – 2022 rata – rata jumlah proyek 1,222 dengan rata- rata realisasi proyek setiap tahunnya sebesar Rp. 8.035.829.000.6.

Pada tabel 1.3 nilai penanaman modal asing (PMA) dan tabel 1.4 nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 saat covid -19 terjadi pemerintah Sulawesi Utara mampu untuk meningkatkan nilai PMA dan PMDN baik dalam jumlah proyek maupun jumlah realisasi. Akan tetapi secara rata – rata nilai investasi dari penanaman modal asing (PMA) masih jauh dibandingkan dengan nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum optimal dalam usaha menarik investor asing yang dapat memberdayakan potensi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka (Jiwa)

Tahun	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka
2018	1,175,809	690,246	1,095,145	80,664
2019	1,192,784	685,117	1,128,677	64,107
2020	1,225,050	706,586	1,134,802	90,248
2021	1,212,337	738,421	1,126,797	85,540
2022	1,242,088	726,883	1,159,965	82,123

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2018 – 2022 jumlah angkatan kerja yang bekerja lebih banyak daripada jumlah pengangguran di provinsi Sulawesi Utara. Seperti pada tahun 2018 jumlah Angkatan kerja di provinsi Sulawesi Utara mencapai 1,175,809 jiwa dan yang memiliki pekerjaan hanya sekitar 1,095,145 jiwa sementara jumlah pengangguran berjumlah 80,664.

Tabel 1.6 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah)

Tahun	Total Realisasi Belanja (Ribu Rupiah)
2018	3,656,101,960
2019	4,179,431,837
2020	3,996,790,454
2021	4,078,546,335
2022	4,500,000,000

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2022

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal/kebijakan anggaran yang sangat efektif dalam menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendukung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perputaran ekonomi positif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara untuk kesejahteraan Masyarakat. Maka dari itu, saya merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh investasi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja ,dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Maka dari itu, saya mengambil judul “Analisis

Penanaman Modal Asing (Pma), Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara”.

Rumusan Masalah

- Bagaimana realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara?
- Bagaimana realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara?
- Bagaimana jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara?
- Bagaimana jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara?
- Bagaimana penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara ?

Tujuan Penelitian

- Menganalisis pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
- Menganalisis pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
- Menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
- Menganalisis pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
- Menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara.

Manfaat Penelitian

- Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menetapkan kebijakan Pembangunan ekonomi daerah.
- Bagi peneliti dalam penelitian ini, manfaat tentunya untuk mengimplementasikan teori perekonomian yang telah saya pelajari dalam penelitian ini dan keterkaitannya dengan bidang Pembangunan ekonomi yang ada.
- Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan dari penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Todaro (2011), pembangunan ekonomi yaitu proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, manusia berperan cukup besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2011), agar dapat tumbuh, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat. Akan tetapi, laju pertumbuhan aktualnya untuk setiap tingkat tabungan dan investasi-seberapa banyak tambahan output yang diperoleh dari penanaman jumlah investasi-dapat diukur dengan kebalikan rasio modal-output, c , karena kebalikannya, $1/c$ adalah rasio output-modal atau rasio output/investasi. Ini berarti bahwa dengan melipatgandakan tingkat investasi baru, $s - I/Y$, dengan tingkat produktivitasnya, $1/c$, akan diperoleh tingkat pertumbuhan yang akan mempertinggi pendapatan nasional atau GDP.

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha

merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.

Teori Investasi

Teori investasi adalah teori permintaan modal. Dalam makro ekonomi, investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. Lebih jauh disebutkan bahwa modal merupakan stok ketika nilai uang dari gedung-gedung, mesin-mesin, dan inventaris lain adalah tetap pada suatu waktu. Baik PDB maupun investasi mengacu kepada arus pengeluaran. Investasi adalah jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal pada periode tertentu.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Sementara PMA adalah kegiatan investasi yang hanya meliputi penanaman asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pemilik modal secara langsung menanggung resiko. Sinergitas PMDN dan PMA akan sangat membantu perekonomian nasional, karena dengan adanya aliran modal yang masuk, hal tersebut juga berarti usaha-usaha ataupun industri-industri yang tumbuh di Indonesia akan memiliki cukup dana untuk meningkatkan produktivitasnya.

Teori Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Neo Classical Economic theory Teori ini menjelaskan bahwa masuknya investasi membawa dampak yang positif dan diterima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *home country*. Hal ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa ke penerima modal akan mendorong modal domestik yang kemungkinan digunakan untuk berbagai usaha.

Teori Tenaga Kerja

menurut Keynes, berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak berkerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (Labour Union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah. Para tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Penurunan upah dipandang kecil sekali, karena akan mempengaruhi kepada daya beli masyarakat yang menyebabkan konsumsi menurun dan berkurangnya daya beli akan mendorong harga-harga menurun.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga angkatan kerja memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan ini merupakan ciri khas dari sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam GBHN 1999-2004 diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat Subandi, (2011).

Teori Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2003), menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara produktif akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Namun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah

benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benarbenar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Teori makro pengeluaran pemerintah menjelaskan mengenai perhitungan panjang pertumbuhan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah (Bailey, 1995 dalam Orisu, 2014). Teori makro pengeluaran pemerintah oleh Mangkoesoebroto (2001) dibedakan menjadi tiga golongan, yakni teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, teori Adolf Wagner, dan teori Peacock & Wiseman.

Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesoebroto (2002) mengemukakan bahwa jika dalam teori makro pengeluaran pemerintah dapat dituangkan dalam beberapa model dan digunakan untuk menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, maka dalam teori mikro, pengeluaran pemerintah lebih bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan atas barang publik dan faktor yang memengaruhi tersedianya barang publik tersebut

Teori Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur tingkat penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya yang diatur dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Nahumuri, 2019).

Penelitian Terdahulu

Trias Fajar Novianto (2013), melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan daerah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB dengan tingkat signifikan 0,016 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, hasil penelitian variabel investasi terhadap pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan tingkat signifikansi 0,322 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, hasil penelitian angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,044 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

Fitrah Afrizal (2013), yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat investasi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB dengan nilai thitung $7,021161 > 2,228$ ttabel. Dari hasil penelitian belanja pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai thitung $7,317007 > 2,228$ ttabel. Dan dari hasil penelitian juga diketahui adanya pengaruh positif antara variabel tenaga kerja terhadap PDRB dengan nilai thitung $3,106299 > 2,228$ ttabel.

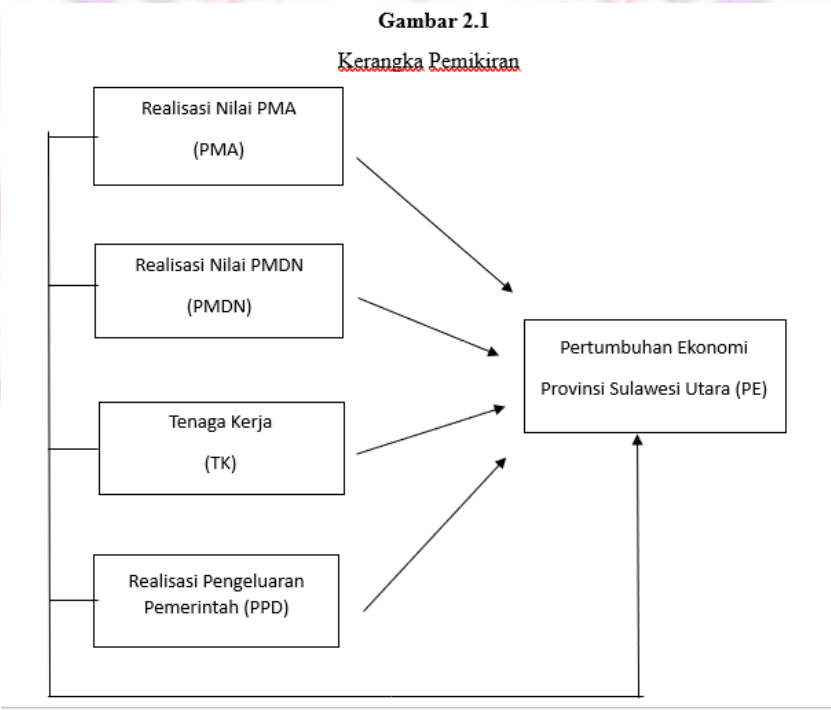
Andre Widdyantoro (2013) “Pengaruh PDB, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Periode 2000-2011.”, Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) dijelaskan bahwa secara simultan PDB UKM, investasi UKM, dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2011 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Secara parsial hasil estimasi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menjelaskan bahwa investasi UKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2011. Sedangkan PDB UKM dan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2011. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah upah dan jumlah unit industri kecil dan permintaan tenaga kerja. Dengan ruang lingkup yang lebih luas tidak terbatas pada satu industri saja tetapi lebih kepada keseluruhan jumlah unit industri kecil yang ada di Kabupaten Tulungagung tahun 2003-2016.

Luthfiah (2017) “Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat Periode 2012-

2015. Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat tetapi penyerapan kerjanya masih kalah dengan sektor perdagangan. Peningkatan jumlah unit usaha tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah, sedang dan besar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha, investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan model fixed effect yang diambil melalui uji Chow test dan uji Hausman test. Analisis data menggunakan bantuan program Eviews 8. Data yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah unit usaha, investasi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial, variabel jumlah unit usaha dan investasi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah upah dan jumlah unit industri kecil dan permintaan tenaga kerja. Dengan ruang lingkup yang lebih luas tidak terbatas pada satu industri saja tetapi lebih kepada keseluruhan jumlah unit industri kecil yang ada di Kabupaten Tulungagung tahun 2003-2016.

Hellen (2017), Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh efek langsung dan tidak langsung investasi dan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Malinau. Studi tersebut menemukan bahwa: tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sementara investasi dan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Buruh dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada pekerjaan, investasi dan belanja pemerintah sementara tidak berpengaruh signifikan terhadap lapangan kerja. Investasi, tenaga kerja, belanja pemerintah. efek tidak langsung terhadap pekerjaan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Pemikiran



Hipotesa penelitian

1. Diduga realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Diduga jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

4. Diduga realisasi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Diduga realisasi nilai penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), Tenaga kerja, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data kualitatif, merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian. Seperti data mengenai gambaran umum mengenai Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Data kuantitatif, merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Seperti dalam penelitian ini yaitu data – data Pertumbuhan ekonomi (PDRB), penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), Tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu 2003-2022. Pengumpulan data meliputi buku-buku, internet, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang diambil adalah data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang diterbitkan oleh Instansi/lembaga/organisasi profesi dan lain-lain di Provinsi Sulawesi Utara

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Silaen (2018), mengungkapkan bahwa “variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi. Data PDRB dikeluarkan oleh BPS dan dinyatakan dalam satuan persen. Produk Domestik Bruto adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam waktu tertentu, Realisasi nilai PMA adalah realisasi penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan dalam satuan Rupiah dalam kurun waktu 2003 – 2022, Tenaga Kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/jasa secara kontinu di Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan dalam satuan orang / jiwa dalam kurun waktu 2003 – 2022, Pengeluaran pemerintah daerah adalah realisasi total belanja daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan dalam satuan Rupiah dalam kurun waktu 2003 – 2022.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan/hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang perhitungannya menggunakan Eviews 8. Eviews adalah program komputer berbasis Windows yang dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika jenis runtun waktu atau time series. Metode regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4$$

Keterangan (Sugiyono:2013):

Y = Variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi variabel Independen

X_1 = Penanaman Modal Asing (PMA)

X_2 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

X_3 = Tenaga Kerja

X_4 = Pengeluaran pemerintah

Model Persamaan

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (Neoclassical Growth Model), dengan fungsi produksi agregat standar :

$Y = A e^{\mu t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$ (1)

$Y = f (PMA, PMDN, TK, PPD)$(2)

Model ekonometrika (Gujarati, 2003) :

$Y = \beta_1 + \beta_2 PMA + \beta_3 PMDN + \beta_4 TK + \beta_5 PPD + e$ (3)

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh :

$PE = A PMA^{\beta_1} PMDN^{\beta_2} TK^{\beta_3} PPD^{\beta_4}$(4)

Untuk memperoleh linear bentuk persamaan (5) maka persamaan tersebut dilinearakan dengan menggunakan logaritma, sehingga diperoleh:

$PE = \beta_1 L_PMA + \beta_2 L_PMDN + \beta_3 L_TK + \beta_4 L_PPD + e$(6)

Keterangan :

PE = Pertumbuhan ekonomi

L_PMA = Logaritma Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

L_PMDN = Logaritma Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

L_TK = Logaritma jumlah tenaga kerja

L_PPD = Logaritma pengeluaran pemerintah daerah

e = error term

β_1 = koefisien penanaman modal asing (PMA)

β_2 = koefisien penanaman modal dalam negeri (PMDN)

β_3 = koefisien tenaga kerja (TK)

β_4 = koefisien pengeluaran pemerintah daerah (PPD)

Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Goodness of Fit Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit suatu model persamaan regresinya. Pengukuran goodness of fit tersebut dapat dilakukan melalui nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dengan t tabel. Dalam pengujian ini dilakukan dengan uji 2 sisi (two tail test) dengan tingkat kepercayaan 95 % atau $\alpha=5\%$ dengan hipotesis $H_0:\beta_0=\beta_1=\beta_2=0$ dan $H_a:\beta_0\neq\beta_1\neq\beta_2\neq 0$.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara statistik bahwa koefisien regresi dari variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna dengan membandingkan nilai probabilitas (F-statistik) dengan F tabel, dengan ketentuan jika $F_{statistik} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan formulasi hipotesis sebagai berikut : $H_0:\beta_0=\beta_1=\beta_2=0$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. $H_a:\beta_0\neq\beta_1\neq\beta_2\neq 0$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011: 97).

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji multikolineritas, heteroskedasitas dan autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel realisasi penanaman modal asing (PMA), realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), jumlah tenaga kerja kerja (TK) dan realisasi jumlah pengeluaran pemerintah (PPD) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati,2003).

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4.3 Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.10059	1.764952	9.122392***	0.0000
PMA	0.229215	0.057654	3.975672***	0.0012
PMDN	0.072125	0.059903	1.204026*	0.2472
PPD	4.97E-10	1.26E-10	3.951685***	0.0013
TK	-5.26E-06	2.31E-06	-2.279452**	0.0377
R-squared	0.901058	Mean dependent var		17.53581
Adjusted R-squared	0.874674	S.D. dependent var		0.818452
S.E. of regression	0.289744	Akaike info criterion		0.572679
Sum squared resid	1.259273	Schwarz criterion		0.821612
Log likelihood	-0.726790	Hannan-Quinn criter.		0.621273
F-statistic	34.15104	Durbin-Watson stat		1.144565
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 8, 2023

Ket : *** Signifikan pada < 0,01
** Signifikan pada < 0,05
* Tidak Signifikan > 0,10

Berdasarkan hasil output diatas diperoleh persamaan :

PE = 16.10059 + 0.229215 + 0.072125 + 4.97E-10 – 5.26E-06 + e

Dengan : PE = Pertumbuhan Ekonomi
PMA = Penanaman Modal Asing
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri
TK = Tenaga kerja
PPD = Pengeluaran Pemerintah Daerah

- Hasil persamaan dari Tabel dapat diterjemahkan konstanta pertumbuhan ekonomi sebesar 16.10059 yang mengandung arti bahwa jika variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga kerja (TK), dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) sama dengan 0, maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 16.10059.
- Nilai koefisien Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 0.229215 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable PMA sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 0.229215, dan sebaliknya.

3. Nilai koefisien Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu sebesar 0.072125 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable PMDN sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 0.072125, dan sebaliknya.
4. Nilai koefisien Tenaga Kerja (TK) yaitu sebesar $-5.26E-06$ berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable TK sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi turun sebesar $-5.26E-06$, dan sebaliknya.
5. Nilai koefisien Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) yaitu sebesar $4.97E-10$ berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable PPD sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar $4.97E-10$, dan sebaliknya.

Hasil Uji T (Parsial)

- a. t hitung variabel Penanaman Modal Asing (PMA)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh PMA terhadap PE adalah sebesar $0.0012 < 0,05$ dan nilai t hitung $3.975672 > t$ tabel 2.13145 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, maka variabel PMA berpengaruh positif signifikan terhadap variabel PE.
- b. t hitung variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh PMDN terhadap PE adalah sebesar $0.2472 > 0,05$ dan nilai t hitung $1.204026 < t$ tabel 2.13145 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka variabel PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PE.
- c. t hitung variabel Tenaga Kerja (TK)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh TK terhadap PE adalah sebesar $0.0377 < 0,05$ dan nilai t hitung $2.279452 > t$ tabel 2.13145 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, maka variabel TK berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel PE.
- d. t hitung variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD)
Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh PPD terhadap PE adalah sebesar $0.0013 < 0,05$ dan nilai t hitung $3.951685 > t$ tabel 2.13145 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, maka variabel PPD berpengaruh positif signifikan terhadap variabel PE.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (TK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (0,05). Hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan nilai sig $0.000000 < 0,10$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diartikan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (TK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

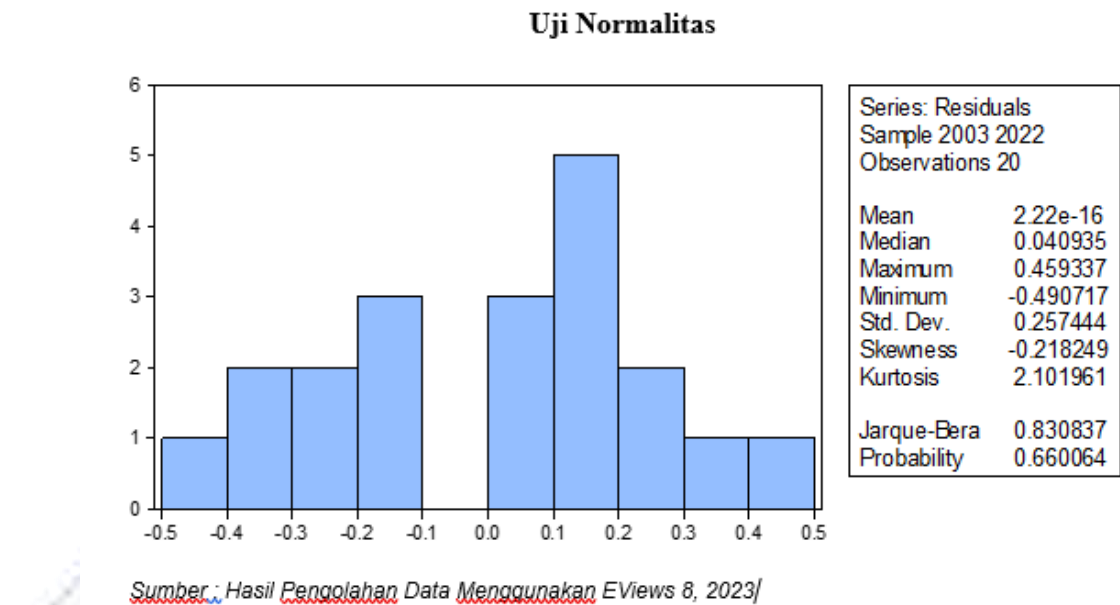
Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji R^2 atau koefisien determinasi yaitu nilai Adjusted R Square sebesar 0.901058 menunjukkan bahwa kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (TK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 90% ($0,90 \times 100\%$). Sisanya sebesar 10% ($100\% - 90\%$) dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik pada dasarnya merupakan salah satu uji yang digunakan untuk persyaratan statistik. Hal ini harus dipenuhi hanya pada analisis regresi linier berganda, dan tidak pada regresi linier sederhana. Analisis yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah regresi linier berganda berbasis OLS atau Ordinary Least Square. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,660 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 11/14/23 Time: 05:37
Sample: 2003 2022
Included observations: 20

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	558.8326	183939.1	NA
PMA	0.003265	447.4499	3.745011
PMDN	0.003122	393.9858	5.981363
TK	3.427431	217687.0	8.416096
PPD	0.034498	5116.654	7.416585

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 8, 2023

dari angka 10. Ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.105809	Prob. F(2,13)	0.1614
Obs*R-squared	4.893924	Prob. Chi-Square(2)	0.0866

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 8, 2023

Dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas, nilai probability Obs*R-squared memiliki nilai sebesar $0,0866 > 0,05$) maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.598030	Prob. F(4,15)	0.0785
Obs*R-squared	8.185310	Prob. Chi-Square(4)	0.0850
Scaled explained SS	4.391676	Prob. Chi-Square(4)	0.3556

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan EVIEWS 8, 2023

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser, probability Obs*R-squared sebesar 0,3556 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai koefisien variabel Penanaman Modal Asing (PMA) adalah 0.229215. Hal ini dapat diartikan bahwa jika Penanaman Modal Asing (PMA) naik sebesar satu persen maka tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 22% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara. Variabel penanaman modal asing (PMA) adalah variabel yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara terbesar mencapai 22% dibandingkan dengan variabel lain yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN), tenaga kerja (TK), pengeluaran pemerintah (PPD).

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzul Apal Mangun Madin (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi Sulawesi Utara menjamin bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat. Dikarenakan kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai koefisien variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah 0.072125 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable PMDN sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 7%, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibentuk pemerintah tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam UU ini, yang dimaksud dalam Penanaman Modal Asing (PMA) hanya investasi yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dijalankan berdasarkan ketentuan UU yang ditetapkan dalam mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Dengan pengertian bahwa secara langsung pemilik modal yang menanggung resiko dari penanaman modal asing tersebut.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Sri Asiyani (2013) dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur” investasi PMDN dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dapat dilihat pada tahun 2006 kenaikan investasi PMDN sebesar 3006,69 persen, namun pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi yang tinggi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PMDN yang berfluktuasi disebabkan oleh faktor tata kelola infrastruktur dan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah yang masih kurang baik dan perlu dibenahi kembali. Infrastruktur menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Infrastruktur, terutama sarana transportasi, yang baik akan menekan biaya distribusi dan mengefektifkan perekonomian.

Dengan perbandingan nominal total penanaman modal asing (PMA) dalam rupiah sebesar Rp. 13.611.386.757 sedangkan besarnya total nominal penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp. 24.107.489 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% dapat disimpulkan bahwa masih kurang kepercayaan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Pengaruh Tenaga Kerja (TK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai koefisien Tenaga Kerja (TK) yaitu sebesar $-5.26E-06$ berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable TK sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi turun sebesar 0.000526%, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel TK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rendy Alvaro (2021) dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” Variabel ketiga adalah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam kaitan dengan masalah ketenagakerjaan, hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “tenaga kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Meskipun demikian, tingginya tingkat angkatan kerja tidak akan menambah keuntungan suatu daerah tanpa diimbangi dengan tercukupinya lapangan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita Masyarakat.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Nilai koefisien Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) yaitu sebesar $4.97E-10$ berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variable PPD sebesar 1% maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 0.0000000497%, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel PPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merri Anitasari (2015), dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu” Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu. Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 4,734 + 2,968x$. Berdasar persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi 2,968 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bila semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Bengkulu. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu adalah kuat, hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,711. Nilai R² sebesar 0,505 artinya bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh atau kontribusi sebesar 50,5 % terhadap pertumbuhan ekonomi dan 49,5 % dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 3,194 dan nilai probabilitas sebesar 0,010. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu.

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendukung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PMA,PMDN,TK,PPD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN, tenaga kerja (TK), pengeluaran pemerintah daerah (PPD) berpengaruh yang signifikan secara Bersama-sama. Ini berarti bahwa, berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, ada hubungan yang kuat antara semua variabel independent terhadap variable dependent yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.
2. Variabel Penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.
3. Variabel Tenaga Kerja (TK) berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.
5. Variabel penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN, tenaga kerja (TK), pengeluaran pemerintah daerah (PPD) secara simultan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas dan kemudahan dalam perizinan terhadap para investor asing maupun dalam negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Utara. Sehingga dengan adanya para investor ini akan membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi seperti masuknya tenaga ahli serta pengadaan teknologi baru ke Indonesia. Selain itu proyek yang sedang dijalankan juga akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan tingkat kesejahteraan Masyarakat meningkat dengan demikian pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara juga dapat meningkat.
2. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara sebaiknya mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja serta menyiapkan pengembangan infrastruktur, pengembangan investasi dan pengembangan perdagangan serta mempercepat angkatan kerja terampil produktif. Pada sisi tenaga kerja, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional menciptakan tenaga kerja terampil produktif agar tingkat pengangguran berkurang sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran/belanja daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian pengeluaran dimaksud harus dilakukan dengan perencanaan yang akurat dan pengawasan yang baik, sehingga bisa terhindar dari kemungkinan terjadinya kebocoran dalam realisasi anggaran.
4. Bagi para investor yang ingin berinvestasi barang dan jasa baik investor asing maupun investor dalam negeri diharapkan untuk memperhatikan risiko dari investasi agar tidak mengalami kerugian. Setiap Investor selain mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, diharapkan memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah khususnya bagi Provinsi Sulawesi Utara contohnya menciptakan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur.

5. Disarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta dapat dan menambah periode waktu penelitian agar mendapatkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaman. (2004). *Determinant of Economic Growth In Brunai Darussalam*. Journal of Asia Economics 15.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Penerbit BP STIE YKPN.
- Arsyad, Lincoln. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Abdul, Halim. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, Feriyanto. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UU STIM YKPM.
- Basuki, Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2022*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Utara, a tahun 2003-2022*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja Bekerja, dan Pengangguran Terbuka (Jiwa) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2022*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. *pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2022*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dona, Fery. (2017). *Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
- Dinh, Trang & Vo, Duc & Vo, Anh & Cong Nguyen, Thang. (2019). *Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries*. Journal of Risk and Financial Management. 12. 176. 10.3390/jrfm12040176.
- David, Ricardo. (1817). *Principles Of Political Economy And Taxation*. <https://core.ac.uk/download/pdf/574 KB.pdf>
- Fabozzi, J.Frank. (2000). *Manajemen Investasi Buku Dua*. Salemba Empat. Pearson Education Asia Pte.Ltd..Prentice-Hall.
- Fitrah, Afrizal. (2013). *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011*.
- Haddad, Mona dan Harrison Ann. (1993). *Are There Positive spillovers from direct foregin investment? Evidance from panel data for Morroco*. Journal of Development Economics. 42(1993) 51-74 North-Holland.
- Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Jhingan,M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*.UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2005). *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw N,Gregory. (2009). *Macroeconomics 7th Edition*. NewYork: WorthPublishers.
- Mulyadi, S. (2014), *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mankiw N, Gregory. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Ed.4. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mar'atun, Sholehati. (2017). *Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung : Skripsi UIN Raden Intan.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2002). *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Nanga, Muana. (2005). *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Nahumuri, L. L. (2019). *Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(1), pp. 1–12. doi: 10.33701/jipsk.v4i1.597.
- Noor, Any. (2009). *Manajemen Event*. Bandung: Alfabeta.
- NSWI. *Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2022*.
- Pramadhani, M. , B. Rakesh Bissoondeeal and D. Nigel. (2007). *FDI Trade And Growth, A Causal Link? Working Paper*. Birmingham (UK): Aston University.
- Republik Indonesia, UU No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. *tentang tenaga kerja*
- Republik Indonesia. Undang-undang No 25 Tahun 2007. *Tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 6 Tahun 1968 jo.No.12 Tahun 1970 *tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*.
- Rosen, H.S. (2014). *Public Finance, Tenth Edition, Global Edition*. the McGraw-Hill Series in Economics.
- Riyadi Dan, Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika.
- Rudy, Badrudin. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryono. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Penerbit Salemba : Empat Edisi Pertama.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadono, Sukirno. (2000). *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sendjun H, Manulang. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi Edisi Pertama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tarigan, Robinson. (2014). *ekonomi regional, edisi revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerjemah: Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *tentang Penanaman Modal*. Pasal 1 Ayat (9)
- Trias Fajar, Novianto. (2013). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah, Penelitian Terdahulu, Jurusan IESP*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.